

**PANDANGAN REALISME NEOKLASIK TERHADAP KEBIJAKAN  
*EXECUTIVE ORDER 13769* OLEH DONALD TRUMP TAHUN 2015-2017**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**AURELIA DZETA AMARCA**

19323082

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**PANDANGAN REALISME NEOKLASIK TERHADAP KEBIJAKAN  
*EXECUTIVE ORDER* 13769 OLEH DONALD TRUMP TAHUN 2015-2017**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**AURELIA DZETA AMARCA**

19323082

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Pandangan Realisme Neoklasik Terhadap Kebijakan *Executive Order*  
13769 Oleh Donald Trump Tahun 2015 – 2017**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan  
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

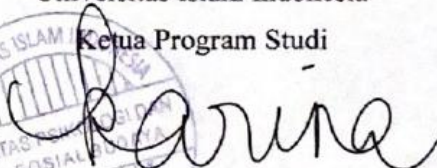
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan


## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 14 Desember 2023*



---

*Aurelia Dzeta Amarca*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	14
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	14
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	14
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
<b>BAB 2</b>	<b>17</b>
<b>PROBLEMATIKA IMIGRAN DI AMERIKA SERIKAT, KEBIJAKAN IMIGRASI AMERIKA SERIKAT SETELAH 9/11, DAN KEBIJAKAN EXECUTIVE ORDER 13769</b>	<b>17</b>
2.1. Problematika Imigran Muslim di Amerika Serikat	17
2.2. Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat Setelah 9/11	23
2.2.1. Kebijakan Imigrasi Masa Pemerintahan George W. Bush (2000 - 2009)	23
2.2.2. Kebijakan Imigrasi Masa Pemerintahan Barack Obama (2009 - 2017)	28
2.2.3. Kebijakan Imigrasi Masa Pemerintahan Donald Trump (2017)	30

2.3. Kebijakan Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States	32
<b>BAB 3</b>	<b>38</b>
<b>PANDANGAN REALISME NEOKLASIK DALAM KEBIJAKAN EXECUTIVE ORDER 13769</b>	<b>38</b>
3.1. <i>Systemic Incentives</i>	38
3.3.1. Timur Tengah Sebagai Ancaman Sosial	39
3.3.2 Timur Tengah Sebagai Ancaman Ekonomi	40
3.3.3 Timur Tengah Sebagai Ancaman Keamanan	41
3.2 <i>Internal Factors</i>	43
3.3.1. <i>Leader Image</i> Donald Trump	44
3.3.2. <i>Strategic Culture</i> Amerika Serikat	46
3.3.3. <i>Relation Between Public and Government</i>	48
3.3.4. <i>Regime Politique Domestic</i>	55
3.3. Bagan Analisis <i>Foreign Policy</i>	58
<b>BAB 4</b>	<b>58</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1 Hardening The U.S. – Mexico and U.S. – Canada Borders

Tabel 2.2.1.2 Challenge For Foreign Students

Tabel 2.2.3.1 Penurunan Tingkat Migran dari Negara Muslim yang Ditangguhkan

Tabel 3.1 Analisis *Internal factors dalam Systemic Incentives*

Tabel 3.1.1 Peningkatan Migran Muslim di Amerika Serikat

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 *Number of Muslim In The U.S Continues To Grow From 2007 – 2017*

Grafik 2.2 *Total Crimes Rates In The U.S 2012 – 2018*

Grafik 2.2.1.1 *Anti – Immigrant Sentiment Among U.S. Residents*

Grafik 2.2.1.2 *U.S. Refugee Ceiling 2000 – 2021*

Grafik 2.2.2.1 *Removals Immigrant by Pesident From Bush – Trump*

Grafik 3.1 *Penerimaan Masyarakat A.S Terhadap Pencalonan Donald Trump Sebagai Calon Presiden*

Grafik 3.2 *Ekspektasi Masyarakat A.S Terhadap Trump Akan Menjadi Presiden Seperti Apa Ketika Terpilih*

Grafik 3.3 *Kepercayaan Masyarakat A.S Terhadap Trump Dalam Menangani Kasus Kepresidenan*

Grafik 3.4 *Kepercayaan Partai di A.S Terhadap Kebijakan Donald Trump di Masa Depan*



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Hasil Jajak Pendapat Masyarakat A.S Mengenai Kebijakan *Executive Order* 13769 Sebelum Dikeluarkan Oleh Donald Trump

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Teori Realisme Neoklasik Dalam Fenomena Kebijakan *Executive Order 13769*

Gambar 3.1 Demonstran di Bandara Int. JFK Terminal 4 New York

Gambar 3.2 *Protesters Gather at U.S Customs and Protection Offices in Washington D.C in 2017 to Oppose A New Travel Ban*

Gambar 3.3 *Protesters Gather at U.S Customs and Protection Offices in Washington D.C in 2017 to Oppose A New Travel Ban*

## DAFTAR SINGKATAN

<b>AS</b>	: Amerika Serikat
<b>AQAP</b>	: Al-Qaeda in the Arabian Peninsula
<b>DACA</b>	: Deffered Action For Childhood Arrivals
<b>DAPA</b>	: Deffered Action For Parents of Americans
<b>DHS</b>	: Department Of Homeland Security
<b>DREAM</b>	: Dream, Relief, and Education For Alien Minors Act
<b>GOP</b>	: Grand Old Party
<b>INA</b>	: Immigration and Nationality Act
<b>ISIS</b>	: Islamic State of Iraq and Syria
<b>JFK</b>	: John Fitzgerald Kennedy
<b>LGBT</b>	: Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender
<b>NSEERs</b>	: National Security Entry – Exit Registration
<b>NYPD</b>	: New York Police Department
<b>PBB</b>	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
<b>SEVIS</b>	: Students Exchange Visitor Information System
<b>SIVS</b>	: Special Immigrant Visas
<b>USRAP</b>	: United States Refugee Admissions Program
<b>US</b>	: United States

## ABSTRAK

Kebijakan *Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States* adalah kebijakan yang disahkan oleh Donald Trump pada 27 Januari 2017 atau yang biasa disebut dengan *muslim ban* karena Kebijakan ini berisikan larangan 7 negara muslim Timur Tengah masuk ke dalam AS. Negara – negara tersebut adalah Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman yang diberlakukan masa penangguhan selama 90 hari untuk masuk AS. Kebijakan ini dikritisi oleh beberapa tokoh politik AS sendiri, masyarakat AS, dan masyarakat internasional karena dianggap Kebijakan ini sangat diskriminatif, namun dibalik itu ada banyak penyebab mengapa kebijakan ini akhirnya bisa disahkan dan dijalankan oleh Donald Trump. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tercetusnya kebijakan *Executive Order 13769* pada tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan teori realisme neoklasik dengan menggunakan dua variabel yaitu *View Of International System* dan *View Of Units*. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab disahkannya Kebijakan *Executive Order 13769* ini adalah pengaruh kekuatan system internasional yang diberikan oleh negara Timur Tengah, leader image Donald Trump, strategic culture AS, relationship between government and public, dan regime politic domestic AS

**Kata-kata kunci:** Executive Order 13769, Donald Trump, Amerika Serikat, Faktor Penyebab

## ABSTRACT

*Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States is a policy passed by Donald Trump on January 27, 2017 or commonly referred to as Muslim Ban because this Policy contains a ban on 7 Middle Eastern Muslim countries entering the US. Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen have a 90-day suspension period to enter the United States. This policy was criticized by some US political figures themselves, the US community, and the international community because it was considered a discriminatory policy, but behind that there are many reasons why this policy can finally be passed and implemented by Donald Trump. This study aims to analyze the factors causing the emergence of the Executive Order 13769 policy in 2015-2017. This research uses the theory of neoclassical realism using two variables, namely View of International System and View of Units. This study found that the factors causing the passage of Executive Order 13769 Policy are the influence of the strength of the international system given by Middle Eastern countries, Donald Trump's leader image, US strategic culture, relationship between government and public, and US domestic political regime*

**Key words:** Executive Order 13769, Donald Trump, United States, Causative Factor

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Amerika Serikat bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki imigran paling banyak di antara negara-negara lainnya, karena Amerika sudah mempekerjakan tenaga kerja asing sedari dahulu. Orang-orang Filipina sudah dipekerjakan dalam industri pertanian sejak dahulu, orang India juga terhitung ribuan dipekerjakan dalam industri perkayuan, dan orang Tiongkok telah dipekerjakan dalam pembuatan rel kereta api 150 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1863 – 1869 sekitar 15.000 pekerja Tiongkok membantu membangun jalur kereta api lintas benua. Bayaran yang didapatkan pun tidak sebanding dengan masyarakat asli Amerika, bahkan lebih rendah. Amerika memang sudah membuka negaranya untuk para imigran semenjak merdeka dari United Kingdom begitu juga dengan kebijakan mengenai Imigranitas yang mulai dibuat (Sayej 2019).

Amerika dijadikan destinasi para imigran bukan tanpa alasan setelah perang dingin berakhir Amerika dianggap sebagai negara yang hebat dan penuh dengan kesejahteraan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh budaya populer Amerika merambah ke seluruh penjuru dunia. Membentuk citra Amerika yang sangat baik, sehingga banyak masyarakat dunia ingin bermigrasi ke Amerika Serikat. Selain mencari kebebasan finansial alasan masyarakat dunia bermigrasi ke Amerika Serikat juga sangat beragam. Mulai dari mencari kebebasan berpolitik, memeluk agama, pendidikan yang lebih baik, standar hidup yang lebih tinggi, dan pencarian suka dikarenakan kekerasan yang dialami di negara asal karena perang (Santoso 2019).

Imigrasi atau imigran merupakan hal yang sangat melekat dengan negara Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menerima banyak sekali imigran asing untuk masuk ke dalam negara mereka untuk turut bersama membangun sosial dan ekonomi Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2002 - 2004 Amerika Serikat telah memberikan hak atau status kewarganegaraan terhadap salah satu negara di Amerika Latin yaitu Meksiko. Juga beberapa negara di Asia seperti Filipina, India, Tiongkok, dan Vietnam. Mayoritas masyarakat Amerika Serikat berasal dari 3 benua lain di sekitarnya yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat merupakan negara Imigran karena 90% penduduknya merupakan Imigran Asing (Taufik and Pratiwi 2021).

Peristiwa 9/11 memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kebijakan Amerika Serikat. hal ini menjadi titik balik bagi Amerika Serikat untuk bisa lebih ketat dalam melindungi negara dan masyarakat didalamnya. Dimulai dengan evolusi - evolusi kebijakan yang dilakukan di berbagai bidang salah satunya yaitu bidang Imigrasi. "*War against terror*" menjadi simbol atau semboyan Amerika Serikat untuk melawan terorisme, siapa sangka hal ini justru menjustifikasi orang muslim sebagai terorisme sehingga berkembangnya sifat *islamophobia* di barat. Donald Trump mengambil kesempatan ini sebagai ajang kampanye yang ia lakukan di tahun 2016 dengan berjanji untuk melarang muslim masuk ke dalam Amerika Serikat demi menjaga keamanan nasional (Patnistik 2011).

Sepanjang masa kampanye yang dilakukan oleh Donald Trump ia lantang dalam menyuarakan isu imigrasi yang ia anggap adalah hal yang paling penting untuk dibahas dan diselesaikan. Donald Trump juga menawarkan slogan atau

kampanye nya dengan tagline *American First : Make America Great Again* di mana hal ini menjadi ambisi besar Donald Trump untuk menjaga kepentingan nasional juga warga negara dari ancaman imigran ilegal maupun terorisme demi keamanan nasional negara Amerika Serikat (Sanjaya 2017).

Bagi Donald Trump kedatangan Imigran itu adalah ancaman bagi warga negara asli Amerika Serikat. Dianggap kedepannya mereka dapat mengambil alih kesempatan serta peluang pekerjaan yang ada di Amerika Serikat, sehingga membuat angka pengangguran di negara Amerika Serikat bagi warga asli meningkat. Hal ini tentunya sangat diperhatikan oleh Donald Trump sehingga ia memperketat kebijakan mengenai imigrasi apalagi setelah kejadian 9/11 yang menimpa Amerika Serikat (Yuliantoro dkk 2017 : 198). Hal ini pula yang mendorong donald trump selama masa nya menjabat mengeluarkan kebijakan kebijakan imigrasi yang kontroversial khususnya bagi kaum muslim timur tengah.

Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden resmi Amerika Serikat di tahun 2017 tidak menunggu lama untuk mengeluarkan kebijakannya. Di minggu pertama ia dilantik tanggal 25 dan 27 januari ia telah menandatangani dua Executive Order mengenai Imigrasi dimana salah satunya adalah "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*" order ini berisi tentang perintah untuk melindungi warga negara Amerika Serikat dari masuknya teroris asing dari migran muslim yang masuk ke dalam Amerika Serikat. Dalam kebijakan *Executive Order 13769* berisikan "Larangan tujuh negara" untuk memasuki Amerika Serikat antara lain negara tersebut adalah negara yang berasal dari Timur tengah dengan mayoritas muslim yaitu, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman (Damayanti and Zrada 2022).

Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini tentunya menuai banyak sekali pro dan kontra. Bagi yang pro yaitu kaum yang memang mendukung Donald Trump dan mengagungkan “*white supremacy*” merasa bahwa yang dilakukan oleh Trump adalah hal yang sangat baik dan benar. Namun, bagi mereka yang kontra terhadap Executive Order ini mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini bersifat diskriminatif dan sangat rasis karena menganggap bahwa tujuh negara timur tengah yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman adalah sarang teroris. Hal ini membuat Amerika Serikat kehilangan wisatawan nya dan penolakan besar besaran yang terjadi di luar maupun dalam negeri bagian seperti Washington D.C dan New York. Beberapa kajian salah satunya kajian Pujayanti mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Trump ini adalah kebijakan yang kontra dengan nilai nilai demokrasi yang dimiliki oleh bangsa Amerika Serikat itu sendiri (Pujayanti 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan Executive Order *13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States* disahkan pada masa kepemimpinan Donald Trump?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui mengenai pandangan realisme neoklasik terhadap kebijakan *Executive Order* 13769 yang dikeluarkan oleh Donald Trump sepanjang tahun 2015-2017.
2. Mengetahui bagaimana proses dari kebijakan yang berlaku dan dijalankan di negara Amerika Serikat khususnya terhadap imigran



asing Timur Tengah yang datang ke negara Amerika Serikat karena adanya kebijakan “*Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*” sepanjang tahun 2015 – 2017 mengenai pembatasan Imigran yang masuk ke Amerika Serikat, bisa jadi hal ini juga memberikan dampak yang signifikan bagi imigran Timur Tengah maupun Amerika Serikat itu sendiri.

3. Agar nantinya penelitian ini bisa digunakan dalam studi literatur Hubungan Internasional untuk dijadikan referensi dalam kasus yang serupa bagi ahli ahli Hubungan Internasional ataupun yang lainnya.

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Cakupan Penelitian dalam hal ini sangat dibutuhkan agar penelitian tidak terlalu lebar dan luas dalam pembahasannya perlu memberikan batasan pada permasalahan yang akan dibahas. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti mengenai pandangan Realisme Neoklasik terhadap kebijakan *Executive order* 13769 Donald Trump dari tahun 2015 - 2017. Penelitian ini akan dimulai dari tahun 2015 karena di tahun 2015 Donald Trump memulai kampanye untuk menjabat sebagai presiden yang mengeluarkan kebijakan *Executive Order* mengenai pembatasan imigran yang masuk ke Amerika Serikat dengan alasan mendahulukan masyarakat Amerika Serikat untuk bisa lebih mendominasi dalam lapangan pekerjaan dengan slogan “*Make America Great Again*”. Penelitian ini diakhiri di tahun 2017 karena kebijakan *Executive Order* 13769 dikeluarkan pada tahun tersebut dan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan topik dalam penelitian ini. Kajian literatur ini berasal dari beberapa jurnal terdahulu yang masih berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Kajian Pustaka yang pertama berasal dari sebuah buku oleh Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell, dan Norrin M. Ripsman dengan judul *Neoclassical Realism, The State and Foreign Policy* buku ini sendiri membahas mengenai teori yang penulis gunakan untuk membahas mengenai topik yang diangkat dalam teori ini juga dijelaskan betapa pentingnya faktor internal dan eksternal suatu negara mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Donald Trump tidak menutup kemungkinan bahwa Donald trump juga mengkondisikan faktor internal dalam mengeluarkan kebijakan executive order 13769 dan mempertimbangkan faktor eksternal terhadap kebijakan yang dikeluarkan tersebut berhubungan dengan isu terorisme yang kerap di sangkut pautkan terhadap Timur Tengah dan peristiwa 9/11 yang masih membekas hingga saat ini bagi negara Amerika Serikat Yang belum bisa sepenuhnya pulih dari kejadian tersebut (Taliaferro, Lobell, and Ripsman 2009)

Kajian Pustaka yang kedua yaitu sebuah Jurnal oleh Yohanes William Santoso dengan judul *Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump* jurnal ini sendiri membahas mengenai pergeseran identitas negara Amerika Serikat dikarenakan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump dianggap kebijakan yang restriktif dengan cenderung mengkriminalisasi imigran gelap dimana hal itu membuat Amerika seakan akan

menjadi negara yang bersifat nativis eksklusif dibanding menjadi negara imigran yang inklusif sehingga hal ini dibahas lebih lanjut untuk mengetahui kebijakan Imigran yang ada pada tahun Donald Trump. Dalam jurnal ini juga menjelaskan mengenai nativisme serta populasi yang dibawa ke ranah politik mulai perlahan menggeser negara Amerika Serikat ke arah negara yang eksklusif (Santoso 2019) .

Kajian Pustaka selanjutnya yaitu berasal dari sebuah jurnal Oleh Taufik, dan Sundari Ayu Pratiwi dengan judul *American First : Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat*. Dalam jurnal ini membahas terkait kebijakan kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Donald Trump dan beberapa dampak yang terjadi akibat dari keluarnya kebijakan kebijakan tersebut. Dalam artikel ini juga mendiskusikan mengenai alasan Donald Trump mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan tersebut berdasarkan slogan American First yang diagungkan agungkan selama masa kampanye dan selama ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Artikel ini juga menyinggung mengenai paham Isolasionisme di era Donald Trump dimana kebijakan kebijakan yang ia keluarkan cenderung membuat Amerika seperti mengeksklusifkan diri sehingga nilai nilai demokrasi di dalamnya sangat bertentangan dengan kebijakan era Donald Trump (Kupchan 2020). Tak hanya membahas mengenai teori isolasionisme namun juga membahas mengenai strategi kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump selama masa pemerintahannya berdasarkan apa dan pengaruh dari mana saja (Taufik and Pratiwi 2021)

Dari ketiga tinjauan pustaka ada beberapa hal yang sudah di bahas pada masa Donald Trump memimpin di Amerika Serikat mulai dari teori yang akan penulis

gunakan yaitu realisme neoklasik dalam memandang fenomena kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump tersebut, eksklusifitas Amerika yang dipengaruhi pribadi nativis Donald Trump, dan pembatasan Imigran di era Donald Trump secara umum berdasarkan slogan *American First*. Maka penulis ingin membahas mengenai pandangan Realisme Neoklasik terhadap kebijakan *Executive Order* 13769 Donald Trump tahun 2017-2021 yang belum dibahas secara spesifik dari ketiga tinjauan pustaka tersebut serta alasan dibalik pengambilan kebijakan Donald Trump tersebut melalui teori realisme neoklasik beserta dampak yang ditimbulkan setelah pengambilan kebijakan tersebut.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam menjalankan penelitian ini tentu penulis perlu untuk meninjau topik yang dibahas menggunakan teori maupun perspektif yang dianggap sesuai untuk menganalisis kebijakan *Executive Order* yang dikeluarkan oleh Donald Trump di tahun 2015 - 2017. Dalam sistem internasional, seringkali sudut pandang realisme digunakan untuk menganalisa perilaku suatu negara. Sepanjang perjalanannya menganalisa perilaku negara teori klasik ini banyak melahirkan teori turunan di bawahnya mulai dari realisme klasik, neorealisme, dan realisme neoklasik. Bagi penulis pandangan Realisme Neoklasik adalah pandangan paling sesuai untuk membahas fenomena mengapa kebijakan *Executive order* 13769 dikeluarkan oleh Donald Trump dari tahun 2015 – 2017.

Pandangan realisme neoklasik ini tentu banyak dikemukakan oleh beberapa tokoh. Salah satu tokoh tersebut bernama Gideon Rose. Kali ini penulis menggunakan penjelasan Gideon Rose mengenai pandangan realisme neoklasik dalam karya Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell, dan Norrin M. Ripsman dalam

bukunya yang berjudul *Neoclassical Realism, The State and Foreign Policy*. Dalam buku ini Gideon Rose menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan atau didukung oleh posisi dan power negara tersebut dalam lingkup internasional. Kapabilitas power dalam kebijakan luar negeri bersifat tidak langsung dan kompleks dikarenakan adanya *pressure* dari *internal factors* seperti, hubungan antar negara dan masyarakat, *strategic cultures*, *leader image*, dan *regime politique domestic*. Dimana di kemudian hari hal ini akan mempengaruhi level variabel seperti pengambilan keputusan, persepsi, dan struktur negara. (Azwar & Suryana 2019).

Realisme Neoklasik sendiri adalah teori yang menggabungkan antara paham realisme struktural dengan konstruktivis. Dalam realisme neoklasik ini menyatakan bahwa tidak mungkin adanya hasil kebijakan luar negeri jika tidak mempertimbangkan kedua aspek internal dan eksternal. Jika hal ini dilihat dari realisme saja bahwa mengatakan faktor eksternal adalah faktor yang sangat penting begitu juga dengan neorealisme yang hanya mempertimbangkan faktor internal. Realisme neoklasik dihadirkan untuk membawa keyakinan bahwa kebijakan luar negeri (*dependent variable*) yang dikeluarkan oleh suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal (*intervening variabel*) dan faktor eksternal (*independent variable*) (Ripsman, Taliaferro, and Lobell 2016).

Faktor eksternal disini juga berarti bahwa sistem internasional ini memiliki pengaruh terhadap perilaku yang dilakukan oleh suatu negara agar menjadi alat analisis terhadap kebijakan luar negeri yang dilakukan sehingga menjadi variabel independen. Perlunya faktor internal adalah sebagai filter untuk menganalisa perilaku negara untuk menjadi pertimbangan terhadap apa yang seharusnya

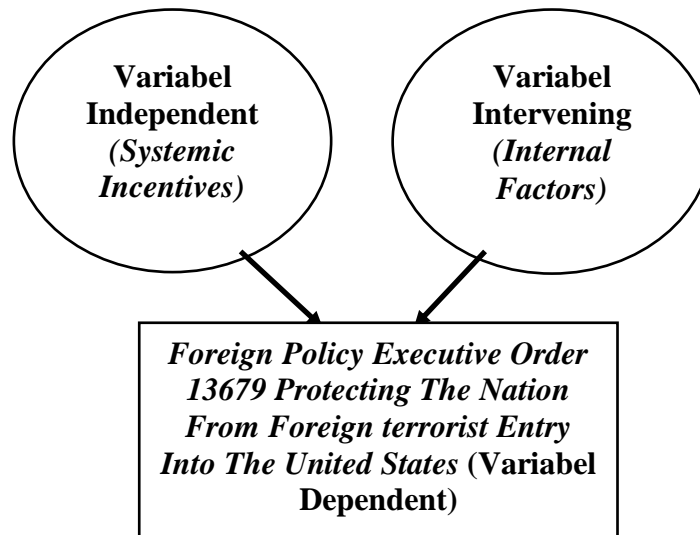
dikeluarkan oleh negara dalam kebijakan luar negerinya dengan intervensi sistem didalamnya. Bisa dikatakan sebagai sistem domestik, kemampuan memobilisasi sumber daya domestik, dan masih banyak lagi (Rose et al. 1998).

Dalam menganalisis topik saat ini sesuai dengan teori yang digunakan maka dibutuhkan tiga elemen analisis dalam perjalanannya yaitu :

1. *Systemic Incentives* merupakan salah satu elemen penting dalam teori Realisme neoklasik dan elemen ini masuk ke dalam kategori faktor eksternal. Elemen international system ini memiliki perspektif mengenai pengaruh kekuatan relatif dianggap kuat dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara. Perspektif ini menjadi faktor dalam pembentukan maupun pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara demi mencapai kepentingannya masing masing. Negara adalah aktor utama dalam kekuatan relatif ini, namun kekuatan relatif seringkali memberikan sinyal yang “tidak jelas” untuk membentuk sistem internasional. Tidak jelas disini berarti pengaruh kekuatan relatif ini diberi oleh lebih dari satu aktor, banyak sekali aktor dalam sistem internasional sehingga terkadang ancaman ataupun peluang menjadi bias dalam hal ini belum lagi kekuatan relatif ini mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Donald Trump mengeluarkan kebijakan *Executive Order 13769* ini bisa jadi dikarenakan faktor eksternal suatu negara dalam sistem internasional seperti dibahas sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan menganalisis kekuatan relatif apa yang mempengaruhi Donald Trump untuk mengambil keputusan dengan variabel analisis ancaman atau peluang apa saja yang dianggap AS untuk mengeluarkan kebijakan *Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*.

2. *Internal Factors* apabila tadi berbicara mengenai faktor eksternal dan perspektif internasional sistem serta dipengaruhi oleh kekuatan relatif yang dianggap terkadang tidak jelas. *internal factors* merupakan salah satu komponen yang penting juga dalam teori realisme neoklasik dalam hal ini *internal factors* masuk kedalam faktor internal suatu negara. *internal factors* memiliki perspektif bahwa sangat penting bagi negara untuk mengkondisikan faktor internal sehingga bisa menjadikan pertimbangan. Ketika kebijakan diambil resiko apa yang sekiranya bisa terjadi, sehingga penting sekali untuk mempertimbangkan units dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dengan dikeluarkannya kebijakan *Executive Order 13769 Protecting The nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States Donald Trump* bisa jadi mengkondisikan faktor internal nya melalui banyak faktor seperti *leader image, strategic culture, relation between public and government, dan regime politique domestic* yang akan dijelaskan dalam *internal factors*.
3. *Foreign Policy* adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Negara akan mempertimbangkan faktor eksternal dan mengkondisikan faktor internalnya untuk mencapai kebijakan luar negeri yang nantinya akan dibahas dalam *foreign policy*. Bagian ini nanti akan digunakan untuk menganalisis bagaimana Donald Trump mengeluarkan kebijakan *Executive Order 13679 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States* melalui faktor eksternal yang akan dibahas dalam *systemic incentives* dan faktor internal yang akan dibahas dalam *internal factors*.

**Gambar 1.1 Skema teori realisme neoklasik dalam memandang fenomena kebijakan *Executive Order 13769***



Sumber : Diolah penulis berdasarkan teori yang bersumber dalam buku *Neoclassical Realism, The State and Foreign Policy* oleh Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell, dan Norrin M. Ripsman.

### **1.7 Argumen Sementara**

Kebijakan Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States oleh Donald Trump dipandang dari teori Realisme neoklasik memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain yaitu :

Faktor pertama yaitu, faktor internal yang dibahas dalam *Internal Factors*. Dalam faktor internal sendiri bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan ini sendiri adalah leader image. Donald Trump yang sedari kampanye 2016 pemilu AS sudah membentuk image yang tidak suka terhadap kaum migran Muslim, namun yang selalu dibahas dan diangkat dalam speech nya maupun cuitannya di twitter adalah migran muslim. Bagi Donald Trump imigran muslim bisa membahayakan keamanan negara Amerika Serikat sehingga



ia membawa kampanye dengan slogan “*America First : Make America Great Again*”. Dalam analisis saya dari teori realisme neoklasik hal ini mempengaruhi Donald Trump untuk mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan *Executive Order 13679 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*.

Faktor kedua yaitu, faktor eksternal yang nantinya dijelaskan dalam *Systemic Incentives*. Dalam faktor eksternal ini sendiri ada pengaruh kekuatan relatif dalam sistem internasional yang dirasa oleh Donald Trump mampu mengganggu stabilitas negara nya. Mulai dari cuitan dan kampanye yang ia lakukan selama pemilu 2016 migran muslim selalu menjadi sasaran empuk Donald Trump untuk diangkat. Pada awalnya isu imigran muslim ini sudah diredam di pemerintahan Obama, namun di tahun Donald Trump ia memunculkan Kembali isu ini yang diangkat ke ranah politik dianggap hal ini bisa mengancam keamanan negara. Negara Timur Tengah dianggap sebagai ancaman bagi Donald Trump sehingga hal ini menjadi landasan kuat nya untuk bisa mengeluarkan kebijakan *Executive Order 13769* tersebut.

Jika menarik garis lebih jauh lagi dengan sejarah Amerika Serikat yang pernah mengalami peristiwa 9/11 tentunya membuat Amerika Serikat dituntut untuk selalu waspada sehingga hal ini mendorong Donald Trump untuk melindungi negara Amerika Serikat. Trump mempunyai beban yang cukup berat karena Amerika telah dipandang sebagai negara yang besar dan hebat. Maka Kebijakan Executive Order 13769 ini dianggap kebijakan yang mewakili suara Amerika Serikat dalam power sistem internasional. Dengan mengkampanyekan “*War On Terror*” terhadap dunia. Bisa disimpulkan saat ini bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump tak lepas dari mengkondisikan faktor internal dan pengaruh kekuatan relatif

eksternal dimana salah satunya yaitu image dirinya sebagai pemimpin Amerika Serikat dan kekuatan relatif dari aktor aktor dalam sistem internasional yang akan dibahas dalam *Foreign Policy*

## **1.8 Metode Penelitian**

### ***1.8.1 Jenis Penelitian***

Penulis menggunakan metode kualitatif saat memeriksa studi yang dilakukan Sebagai sarana untuk mengkaji literatur dan data pendukung serta referensi untuk analisis, Masalah proses penelitian. Ini dapat membantu penulis menganalisis hasil penelitian secara lebih sistematis dan terperinci serta membantu menganalisis beberapa pertanyaan dalam penelitian ini.

### ***1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian***

Tulisan ini berusaha untuk menganalisis bagaimana pandangan Realisme Neoklasik terhadap kebijakan executive order 13769 Donald Trump tahun 2015 - 2017. Maka dari itu subjek dan aktor utama dalam penelitian ini adalah negara Amerika Serikat. Objek penelitian penulis yang akan dikaji ialah mengenai kebijakan *Executive Order* 13769 dengan teori realisme neoklasik sebagai pengkaji.

### ***1.8.3 Metode Pengumpulan Data***

Dalam bagian metode pengumpulan data penulis akan mengumpulkan data dengan cara studi pustaka dimana penulis akan mencari jurnal, buku, skripsi, artikel, berita dan lainnya yang kredibel dan relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

### ***1.8.4 Proses Penelitian***

Dalam bagian proses penelitian ini penulis akan menggunakan kajian literatur literatur yang sudah dicari serta data yang telah diseleksi dan dikumpulkan sesuai

dengan topik penelitian yang penulis jalankan, sedangkan untuk proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahap seperti tahap pertama proses perencanaan apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana penelitian akan dijalankan setelah itu masuk ke dalam tahapan perencanaan judul, teori, topik, dan tema penelitian. Langkah selanjutnya yaitu mencari berbagai macam sumber agar dapat dijadikan referensi seperti jurnal, artikel, buku, berita, makalah, skripsi terdahulu, dan sumber lainnya. Langkah ketiga adalah mulai menulis secara bertahap dan sistematis.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Dalam mengkaji atau melakukan suatu penelitian, agar dapat mempermudah penulis dalam penelitian yang sistematis dan terarah penulis membagi rencana pembahasannya ke dalam beberapa bab sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan yang mencakup identifikasi masalah serta kerangka umum penelitian. Di bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bagian yang berisi seluruh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. Dalam konteks penelitian ini, bab dua akan menjelaskan mengenai kebijakan 13679, problematika imigran Amerika Serikat, dan kebijakan imigrasi setelah peristiwa 9/11.

Bab tiga merupakan analisis dari permasalahan dan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Pada penelitian ini bab tiga akan menganalisis kebijakan 13769 yaitu *“Protecting The Nation From*

*Foreign Terrorist Entry Into The United States*” dengan menggunakan perspektif realisme neoklasik untuk menjawab rumusan masalah.

Bab empat merupakan hasil dari penelitian, yakni kesimpulan dan analisis yang telah dibuat dan dapat menjawab rumusan masalah.

## **BAB 2**

### **PROBLEMATIKA IMIGRAN DI AMERIKA SERIKAT, KEBIJAKAN IMIGRASI AMERIKA SERIKAT SETELAH 9/11, DAN KEBIJAKAN EXECUTIVE ORDER 13769**

#### **2.1. Problematika Imigran Muslim di Amerika Serikat**

Kebijakan Executive Order 13769 disahkan tentunya bukan tanpa alasan. Sebelum memasuki mengapa kebijakan Executive Order 13769 ini tercetus perlu dijabarkan apa saja problematika Imigran yang terjadi di Amerika Serikat sebelum kebijakan ini dikeluarkan. Semenjak peristiwa 9/11 yang terjadi di tahun 2001 masyarakat Amerika Serikat dituntut untuk selalu waspada terhadap keamanan dan kenyamanannya sebagai warga negara Amerika Serikat. Peristiwa terorisme 11 september 2001 yang terjadi di New York dan Washington D.C meninggalkan kenangan pahit bagi Amerika Serikat sekaligus hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap imigran Muslim. Sejak saat itu masyarakat Amerika Serikat mulai memandang imigran Muslim sebagai ancaman (Eisen 2003).

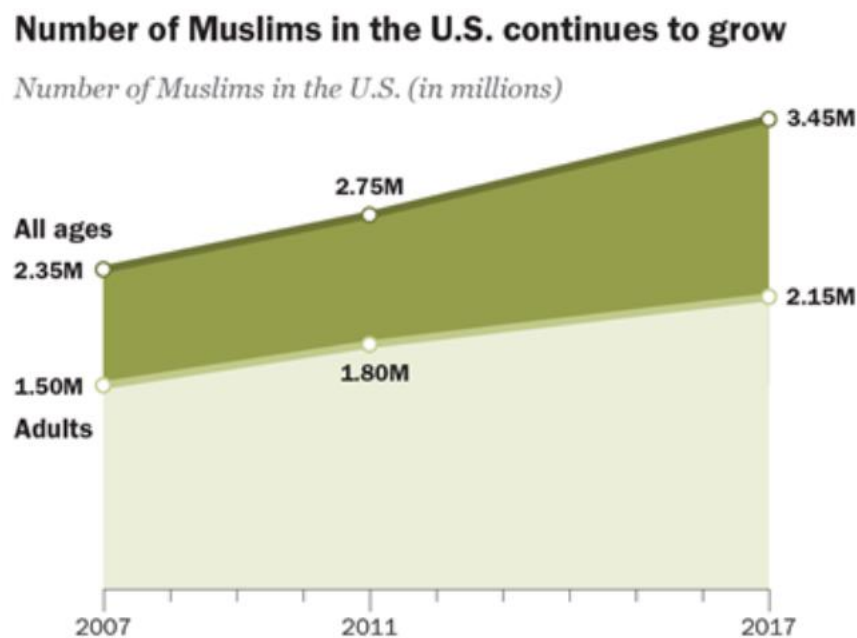
Dampak dari peristiwa tersebut membuat warga Amerika Serikat memusatkan perhatian terhadap imigran asing yang datang khususnya imigran muslim dan yang berasal dari Timur Tengah. Sebanyak 54% warga Amerika Serikat berasumsi bahwa peristiwa 9/11 yang terjadi di tahun 2001 adalah penyerangan teroris yang berdasarkan identitas agama Islam. Ditemukan juga data sebanyak 39% warga Amerika Serikat yang telah memiliki pandangan buruk bagi masyarakat Muslim atau agama Islam (Mogahed 2006).

Hal ini tentunya memicu banyaknya kekerasan, diskriminasi dan ancaman terhadap imigran muslim yang ada di Amerika Serikat. Banyak hal yang terjadi kepada imigran muslim setelah kejadian 9/11 ini seperti :

1. *Triply Traumatized* yang didapatkan pertama dari peristiwa 9/11 itu sendiri, kedua penyerangan dan ancaman yang diperoleh dari masyarakat Amerika Serikat karena menganggap muslim lah penyebabnya sehingga menggeneralisasi semua muslim adalah teroris dan ancaman, yang ketiga yaitu trauma yang berasal dari pihak kepolisian dan pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri dimana seharusnya menjadi tempat yang aman namun sebaliknya muslim dijadikan sebagai target terhadap kekerasan dan diskriminasi.
2. *Being Watched* segala hal yang berkaitan dengan warga asing muslim maupun imigran muslim dilakukan pengawasan mulai dari sektor pendidikan, pekerjaan, bisnis makanan, olahraga dan bidang lainnya. Adanya penahanan izin, persoalan kelulusan, penyegelan bisnis, dan masih banyak lagi. Bahkan ada program yang disebut *Spying Program* yang disponsori oleh NYPD untuk mengawasi pemain muda muslim yang bermain sepak bola dan kriket bersama mereka.
3. *Unrecognized Minority* kaum muslim dijadikan tidak terlihat oleh pemerintah dan masyarakat AS mulai dari komunitas atau organisasi yang membela hak hak sipil, tidak terlihat dalam buku kelompok ras dan etnis di AS, tidak terlihat dalam pelatihan keberagaman dan inklusi bahkan sampai pada saat artikel ini ditulis di tahun 2021 tidak ada kategori Arab-American dalam sensus kependudukan Amerika Serikat.

4. *Feeling The Hate* kelompok advokasi dan hak-hak sipil muslim di AS mendokumentasikan sekitar lebih dari 10.000 bias anti-muslim terjadi sepanjang tahun 2014-2019 dan masih ada 6.000 lainnya lagi di tahun 2020. Dalam bias anti-muslim ini termuat insiden kebencian anti-muslim, imigrasi, diskriminasi, isu bepergian, dan intimidasi di sekolah-sekolah (Eisen 2003).

**Grafik 2.1** *Number of muslims in the U.S. continues to grow from 2007 – 2017*



Sumber : Pew Research Center's Religion & Public Life Project 2017

Menurut data dari *Pew Research Center* pada tahun 2017 terdapat sekitar 3,45 juta imigran muslim yang ada di AS. Diantaranya terdapat 1,35 juta anak-anak, dan 2,15 juta orang dewasa. Populasi imigran muslim di AS diperkirakan menyumbang sebanyak 1,1% dari total populasi yang ada di Amerika Serikat. Sejak pertama kali pusat *Pew Research Center* di tahun 2007 menjalankan penelitian mengenai imigran muslim yang ada di Amerika Serikat menunjukkan hasil sekitar

2,35 juta orang total keseluruhan. Kemudian di tahun 2011 kembali dilakukan penelitian yang menghasilkan populasi imigran muslim di Amerika Serikat semakin bertambah menjadi 2,75 juta orang, sejak saat itu diperkirakan pertumbuhan populasi migran muslim semakin bertambah walaupun dengan skala yg kecil yaitu 100.000 orang per tahunnya (Center 2017).

Diskriminasi yang dirasakan oleh kaum muslim setelah tragedi 9/11 tentunya dipengaruhi juga oleh beberapa kriminalitas oknum migran muslim lainnya yang membuat kekacauan dan teror terhadap warga Amerika Serikat itu sendiri seperti :

1. Penembakan massal yang terjadi di San Bernardino, California Selatan pada tahun 2015 lalu tepatnya pada Rabu, 2 desember. Penembakan massal ini memakan korban sebanyak 14 orang tewas dan 21 orang luka luka. Penyerangan ini dilakukan oleh sepasang suami istri. Tashfeen Malik 27 tahun istrinya dan Syed Rizwan Farook 28 tahun suaminya (Armandhanu 2015). Setelah diselidiki oleh polisi kedua pasangan suami istri ini akhirnya ditemukan dan terlibat baku tembak yang diakhiri tewasnya pasangan suami istri ini. Ketika dilakukan penyelidikan pun di rumah mereka telah menyimpan ribuan butir amunisi dan selusin bom pipa rakitan yang mengindikasikan mereka akan melakukan hal yang lebih jauh dari ini. Mereka menyerang para pegawai Kesehatan yang sedang menikmati makan siang. Motif dari penyerangan ini masih belum jelas diketahui namun ada indikasi bahwa pasangan ini memiliki aliansi dengan ekstrimis jihadis muslim ISIS



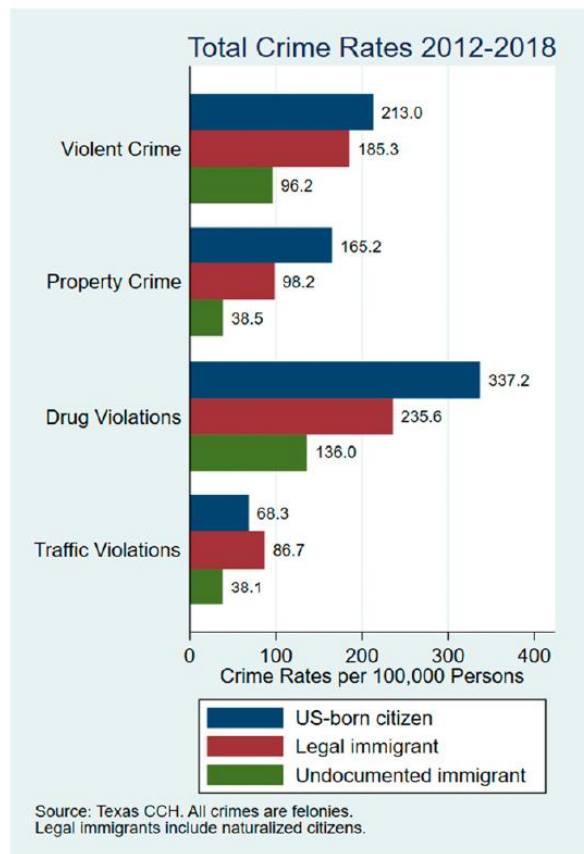
karena pernah melakukan kontak dengan salah satu ekstrimis ISIS tersebut (Medina et al. 2015).

2. Penembakan massal yang terjadi di klab malam Orlando merupakan penembakan massal yang paling mematikan sepanjang sejarah modern Amerika Serikat, karena memakan korban jiwa sebanyak 50 orang tewas dan 53 lainnya terluka dan kritis. Penembakan massal ini dilakukan oleh Omar Mateen pria berusia 29 tahun dari Treasure Coast Florida. 50 LGBT tewas dibunuhnya malam itu tepatnya pada jam 2 dini hari, Minggu 12 juni 2016. Omar Mateen adalah warga negara AS yang lahir di New York namun Ayahnya adalah seorang migran yang berasal dari Afghanistan. Lelaki ini juga dikenal sebagai orang yang kasar oleh mantan istrinya Sitora Yusifiy karena setelah menikah dengannya mantan istrinya ini sering dipukuli dan dilarang untuk berinteraksi dengan keluarganya sendiri. Dalam hal ini mantan istri dan ayahnya juga menyebutkan bahwa ia sangat benci dengan orang-orang LGBT. Motif dari penyerangan ini sendiri pun dikaitkan dengan ISIS dikarenakan pada tahun 2014 Omar pernah dianggap terlibat dalam bom bunuh diri namun dinyatakan bebas karena kontak yang sangat minim. Sebelum ia tewas dalam baku tembak Bersama polisi ia juga pernah menyatakan dirinya terafiliasi dengan ISIS walaupun masih menjadi dugaan awal belum memiliki dasar yang jelas (Beckett 2016)

Setelah diskriminasi yang diterima oleh imigran muslim masyarakat Amerika Serikat masih memiliki persepsi bahwa imigran muslim adalah 'teroris'. Pada kenyataannya menurut data penelitian yang dikeluarkan oleh *National*

*Academy of Science* sepanjang tahun 2012-2018. Dalam penelitian ini memuat beberapa kategori kriminalitas yang diteliti lebih dalam yaitu perampokan, penyerangan, perusakan property, dan narkoba. Penelitian ini membandingkan tingkat kriminal yang dilakukan oleh *legal immigrants*, *native-born citizens*, dan *undocumented immigrants*.

**Grafik 2.2 Total crimes rates 2012 – 2018**



Sumber : Texas Department of Public Safety to compare the criminality of undocumented immigrants to legal immigrants and native-born US citizens between 2012 and 2018.

Dari hasil research menunjukkan data bahwa *native-born citizens* melakukan tindak kejahatan lebih tinggi dari legal immigrant maupun undocumented immigrant. Dari sini bisa disimpulkan walaupun ada kejahatan yang dilakukan oleh imigran, namun sumbangsih tingkat kriminalitas yang lebih tinggi tetap dilakukan oleh *native-born citizens*. Maka tidak bisa di cap atau dikatakan bahwa para

immigrant meningkatkan kriminalitas yang ada di Amerika Serikat, namun kejahatan dan kriminalitas ini yang dijadikan oleh Donald Trump sebagai senjata untuk bisa membuat kebijakan *Executive Order 13769* khususnya terhadap imigran muslim.

## **2.2. Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat Setelah Peristiwa 9/11**

Setelah peristiwa 9/11 terjadi tentu banyak sekali pergolakan sosial dan politik yang terjadi di Amerika Serikat. Mengartikan bahwa ternyata kebijakan imigrasi mereka sebelumnya tidak cukup baik untuk mencegah masuknya terorisme ke Amerika Serikat. Maka dari itu perlu adanya perubahan-perubahan kebijakan yang harus disesuaikan dengan kondisi Amerika Serikat pada saat itu agar lebih maksimal dalam memberikan keamanan terhadap warga negara Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa kebijakan Imigrasi setelah peristiwa 9/11, yaitu :

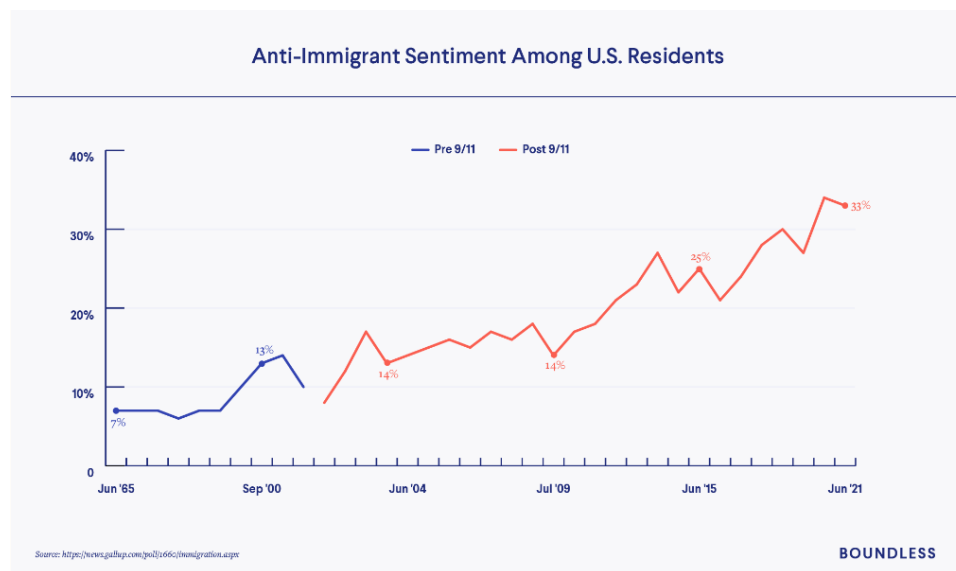
### **2.2.1 Kebijakan Imigrasi Masa Pemerintahan George W. Bush (2001 – 2009)**

Kejadian 9/11 tentu saja merubah sosial dan politik Amerika Serikat. Hal ini menjadi tanda atau titik balik kemunduran kebijakan imigrasi bagi Amerika Serikat. Menandakan berakhirnya optimisme urusan global dan keterbukaan terhadap imigran. Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap para imigran, wisatawan, dan pelajar yang hendak berkunjung ke Amerika Serikat. Pembentukan Department of Homeland Security (DHS) pada tahun 2002. DHS ini sendiri memiliki fungsi untuk menangani imigrasi, bea cukai, kontraterorisme, dan Dinas rahasia. Setelah kejadian 9/11 Amerika Serikat justru melihat Imigrasi melalui kaca mata resiko dan keamanan, padahal diawal masa kampanye presiden George W. Bush menjanjikan reformasi imigrasi yang komprehensif. Bersama Presiden

Mexico pada saat itu yaitu Vicente Fox untuk melaksanakan yg juga disebut sebagai salah satu perubahan dalam kebijakan imigrasi seperempat abad terakhir. Pada masa kampanye sebelum tragedi 9/11 Bush menjanjikan untuk melakukan jalur kewarganegaraan bagi imigran yang tidak memiliki dokumen, mempercepat proses permohonan migrasi, dan perluasan program pekerja tamu (Boundless 2017a).

Segala janji yang dibuat Bush pada saat itu seketika hilang karena adanya tragedi 9/11 setelah peristiwa tersebut Bush lebih fokus terhadap kontraterorisme dan pembentukan DHS dikarenakan sentiment masyarakat pada saat itu terhadap migran sangat melonjak tinggi.

**Grafik 2.2.1.1 Anti – Immigrant Sentiment Among U.S. Residents**

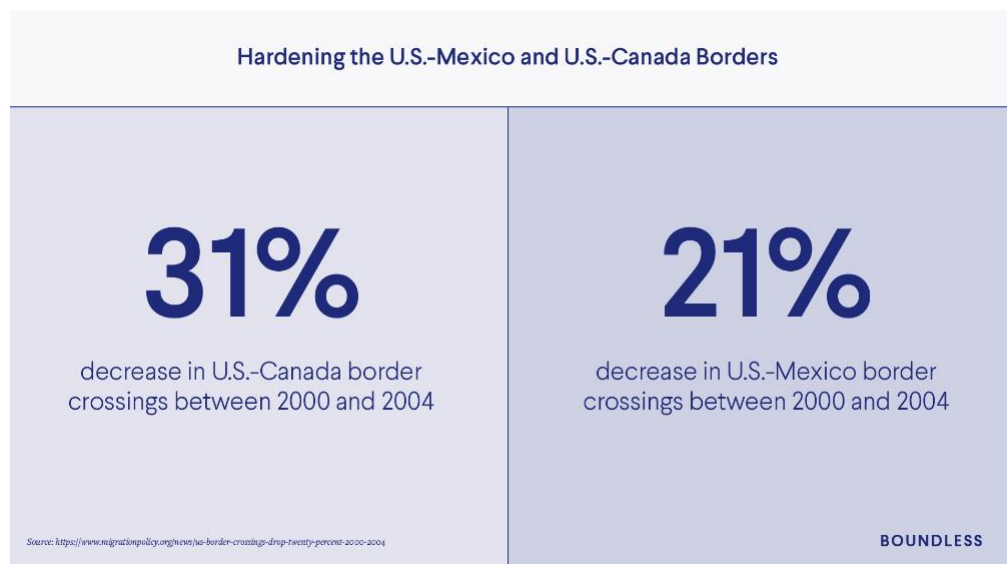


Sumber : Gallups News about Anti – Immigration Sentiment Among U.S Residents from pre 9/11 to post 9/11

Dari data di atas bisa dilihat bahwa sebelum peristiwa 9/11 tingkat sentimen masyarakat AS terhadap Imigran tidak begitu tinggi, namun setelah peristiwa 9/11 terjadi sentimen terhadap Imigran terus meningkat sampai dengan tahun 2021. Maka hal ini tentunya mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bush pada saat itu. Selain batalnya harapan kebijakan Imigrasi yang komprehensif, kejadian

ini juga menyebabkan perbatasan Mexico dan Kanada diberlakukan siaga 1 oleh Departemen Keuangan agar mengecek dengan lebih detail terhadap orang-orang yang akan masuk ke dalam Amerika Serikat. Hal ini tentunya merugikan bagi kerjasama antara AS – Mexico dan AS – Kanada pada saat itu karena mengalami keanjlokkan yang cukup parah (Inc 2007).

**Tabel 2.2.1.1 Hardening the U.S. – Mexico and U.S. – Canada Borders**

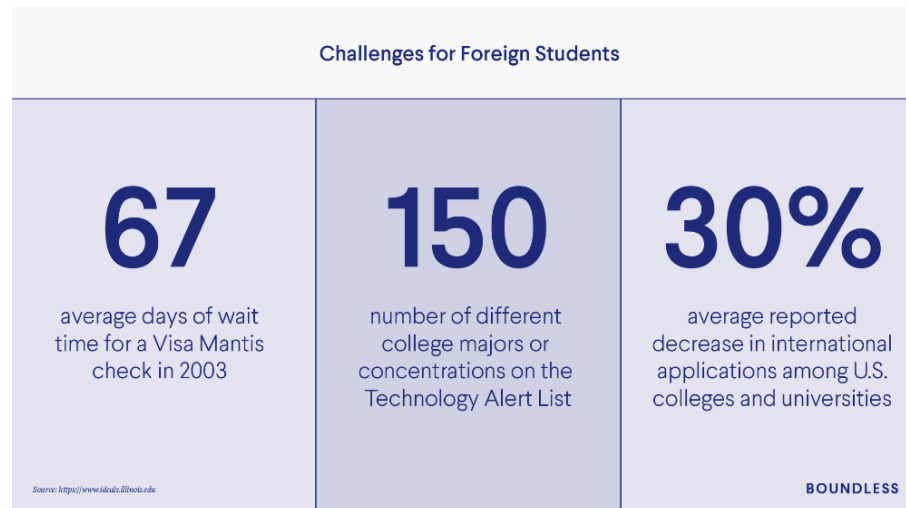


Sumber : Migration Policy Institute data about US – Canada - Mexico Trade and Immigration 2000 – 2004

Kebijakan lain mengenai Imgrasi yang dilakukan oleh Bush pada saat itu juga memberhentikan penyalahgunaan visa pelajar dengan mengikuti program yang bernama Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS). Sistem ini mengharuskan setiap negara dan universitas menginformasikan secara detail calon pelajar seperti apa yang akan masuk ke dalam Amerika Serikat. Kebijakan ini juga menyebabkan banyak penundaan penerbitan Visa dan penolakan yang tidak jelas alasannya. Tentunya ini menyebabkan minat pelajar menjadi sangat rendah untuk datang ke Amerika Serikat karena di rasa AS kurang ramah terhadap para calon

pelajar. Hal ini membuat peminat pelajar di Amerika Serikat mengalami penurunan(Illinois University Library 2003).

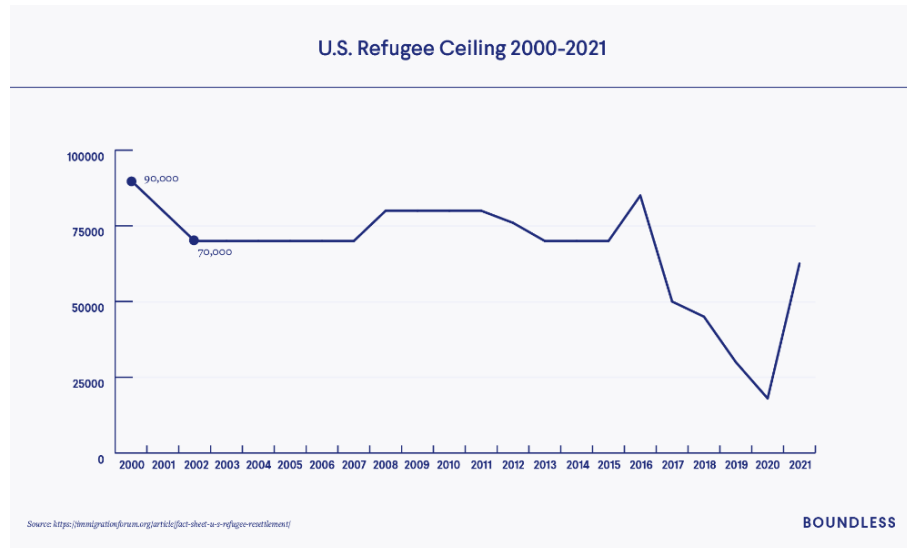
**Tabel 2.2.1.2 Challenges For Foreign Students**



Sumber : Ideals Illinois Library

Program Imigrasi yang juga diubah oleh Bush adalah program United States Refugess Admission Program (USRAP). Program ini mengalami penurunan penerimaan hingga 67%. Pemerintahan Bush menerapkan kebijakan untuk melakukan moratorium terhadap semua penerima pengungsi selama tiga bulan. Moratorium ini sendiri dilakukan untuk mengutip mengenai Immigration and Naturalization Services (INS) untuk memanggil pekerja lapangan untuk mewawancarai di kamps peengungsian dan masalah keamanan. Keputusan Bush pada saat itu juga adalah untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masuk ke dalam Amerika Serikat dari 90.000 menjadi 70.000 kuota saja pertahun nya. Bisa dilihat dari data yang di tampilkan di bawah mengenai penuruan jumlah pengungsi.

**Grafik 2.2.1.2 U.S Refugee Ceiling 2000 – 2021**



Sumber : National Immigration Forum

Pada tahun 2002 Presiden Bush mengeluarkan kebijakan National Security Entry-Exit Registration (NSEERs). Program ini dibuat untuk menyaring atau mewaspadai teroris masuk ke dalam Amerika Serikat. Setiap negara yang masuk ke dalam daftar atau ditunjuk wajib untuk memberikan foto, sidik jari, dan mendaftarkan dirinya Ketika memasuki Amerika Serikat begitupun migran yang sudah tinggal di AS tetap diminta untuk mendaftarkan diri. Kebijakan ini tentunya menyulitkan bagi warga negara Korea maupun negara mayoritas muslim yang muncul dalam negara karena harus memilih keberangkatan sesuai dengan bandara yang diizinkan, namun menurut laporan Kantor Inspektur Jendral DHS tahun 2012 program ini dinyatakan tidak efektif untuk diberlakukan karena terlalu general yg berdasarkan asal negara bukan berdasarkan informasi yang lebih detail (Goodman and Nixon 2016).

Dalam rangka memenuhi resolusi yang ditandatangani pada 18 September 2001 ini Presiden berhak untuk mengerahkan militer yg diperlukan untuk melawan

terorisme / War on Terror. Karena hal itu Bush melakukan konflik bersenjata di Afghanistan pada tahun 2001 dan Irak pada tahun 2003. Ketika konflik ini terjadi tingkat naturalisasi para militer yang bukan warga negara juga turut meningkat karena sudah membantu dalam konflik maka mereka berhak untuk mendapatkan naturalisasi sebagai warga negara Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat juga memberikan Special Immigrant Visas (SIVs) untuk warga negara Iraq dan Afghanistan yang membantu AS selama berperang disana beserta seluruh keluarganya. Selama masa pemerintahan Bush ia telah menandatangani Enhanced Border Security dan Visa Entry Reform Act of 2002 and The Secure Fence Act of 2006. Dengan ini sekali lagi menegaskan kekuatan pemerintah untuk bisa memperluas patrol di daerah perbatasan, melakukan penahanan Imigran tanpa pengadilan, dan melakukan pemagarran sepanjang 850 mil di perbatasan Barat Daya (Boundless 2017a, 11).

### **2.2.2 Kebijakan Imigrasi Masa Pemerintahan Barack Obama (2009 – 2017)**

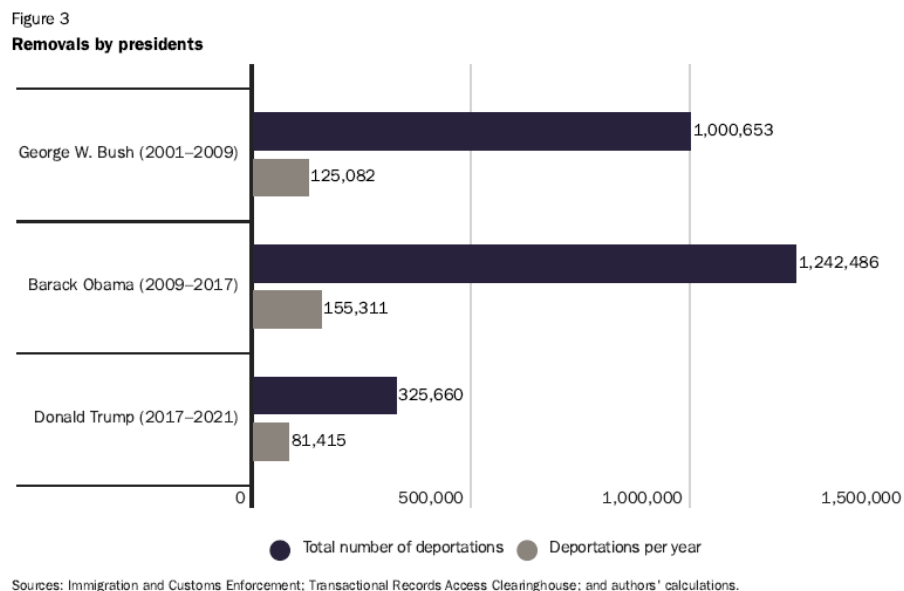
Pada saat masa kampanye pemilihan Presiden tahun 2008 Barack Obama yang didukung oleh Partai Demokrat pada saat itu mengusung konsep meningkatkan sanksi majikan dan legalisasi bagi imigran non kriminal, karena di tahun sebelumnya 2007 Pew Research Center mendata mengenai pelonjakan imigran ilegal mencapai 12,2 juta. Tentunya dengan konsep yang diusung Barack Obama dapat dengan mudah memenangkan kampanye pada saat itu. Kongres lalu mengeluarkan Undang – Undang DREAM (Dream, Relief, and Education for Alien Minors Act) pada tahun 2009 yang berfungsi untuk melegalkan imigran ilegal yang memasuki Amerika Serikat saat masih anak – anak. Sayangnya kebijakan tersebut ditolak oleh Senat setelah lolos di Dewan Perwakilan Rakyat. Tantangan yang



dihadapi Barack Obama pada saat itu tentu tidak mudah, karena melawan dua perdebatan besar tentang Imigrasi Amerika Serikat.

Menyeimbangkan antara memberikan reformasi terhadap 12,2 juta imigran tidak berdokumen dan menyambut imigran baru, sekaligus menjaga perbatasan Amerika Serikat agar tetap aman. Selamat tahun pertama Obama menjabat sebagai presiden jumlah deportasi selalu meningkat setiap tahunnya. Mencapai puncaknya pada tahun 2012 sebanyak 408.849 orang. Orang-orang yang pro terhadap imigran menjuluki Obama sebagai “Deporter – In – Chief” karena protes terhadap kebijakan tersebut. Setelah tahun 2012 tingkat deportasi imigran di Amerika Serikat menurun dengan hanya 235.413 pada tahun 2015 (Transactional Records Access Clearinghouse, 2021).

**Grafik 2.2.2.1 Removals Immigrant by Presidents from Bush – Trump**



Sumber : Immigration and Customs Enforcement, Transactional Records Access Clearinghouse, and authors calculations.

Pada tahun 2012 Barack Obama menanda tangani Executive Order Deffered Action for Childhood Arrivals (DACA). Kebijakan ini berfungsi untuk diperbolehkannya imigran tidak berdokumen yang masih anak – untuk masuk ke Amerika Serikat dan mengajukan masa penangguhan deportasi selama dua tahun yang dapat diperotasi. Memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan untuk bekerja di Amerika Serikat, walaupun kebijakan ini tidak menjanjikan kewarganegaraan bagi mereka yang terdaftar. Di tahun 2014 Obama juga mengeluarkan kebijakan Deffered Action for Parents of Americans and Lawful Permanent (DAPA). Program ini menawarkan untuk menangguhkan imigran yang tidak berdokumen yang telah tinggal di Amerika Serikat sejak 2010 dan memiliki anak yang lahir di Amerika Serikat atau penduduk tetap sah Amerika Serikat. Sayangnya pada tahun 2015 terdapat beberapa tuntutan hukum dari negara bagian yang membuat diblokirnya implementasi DAPA. Pada tahun 2016 Obama juga mengusulkan kebijakan The International Entrepreneur Rule untuk membantu pengusaha asing yang mengembangkan usahanya di Amerika Serikat untuk bisa tetap tinggal di AS (Boundless 2017b).

### **2.2.3 Kebijakan Imigrasi Masa Pemerintahan Donald Trump (2017)**

Selama masa kampanye Donald Trump terus menyinggung mengenai kebijakan imigrasi yang seharusnya diubah, dan menjanjikan untuk melawan terorisme. Pada saat kampanye Donald Trump juga para kaum ‘White Supremacy’ bermunculan untuk turut ikut mendukung segala kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Kebijakan Donald Trump yang cenderung mendiskriminasi migran dan kelompok minoritas ini seolah olah menjadi validasi bagi mereka untuk tampil

di tengah masyarakat. Dalam minggu pertamanya menjabat sebagai presiden ia telah menandatangani tiga *Executive Order* mengenai imigran. **Yang pertama adalah *Executive Order 13767 “Enhancing Public Safety in The Interior of The United States”*** pada tanggal 25 Januari 2017 yang berisikan mengenai peningkatan keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Dikarenakan banyaknya imigran ilegal yang berasal dari berbagai macam negara berada di Amerika Serikat maka perlu diadakannya deportasi ataupun pemulangan, sehingga keamanan Amerika Serikat lebih terjaga. Tingkat kriminalitas dan masih banyak lagi negara yang ternyata tidak mau menerima warga negara nya sendiri ini berlawanan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Perlu diadakannya penegasan atas hukum hukum yang jelas mengenai keamanan internal AS melalui kebijakan ini(Federal Register 2017).

**Kedua adalah *Executive Order 13768 “Border Security and Immigration Enforcement Improvements”*** yang berisikan perintah untuk menjaga kemanan perbatasan dan meningkatkan penegakan hukum terhadap imigran. Kebijakan ini bertujuan untu mengamankan wilayah perbatasan negara Amerika Serikat bagian Selatan yaitu Meksiko. Meksiko dianggap sebagai negara yang dimanfaatkan oleh organisasi transnasional untuk melakukan penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Hal ini disebut menjadi alasan banyaknya terjadi tingkat kriminalitas terhadap warga Amerika Serikat karena obat obatan tersebut. Kebijakan ini dikeluarkan juga untuk membendung peningkatan imigran ilegal yang masuk melalui perbatasan antara Meksiko dan Amerika Selatan dengan membangun tembok(“Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements – The White House,” n.d.).

**Executive Order ke tiga adalah *Executive Order 13769 “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States”*** mengenai pelarangan atau penangguhan imigran yang berasal dari 7 negara muslim yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman untuk masuk kedalam Amerika Serikat selama 90 hari. Juga penangguhan program United States Admission Program selama 120 hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga negara Amerika Serikat tetap aman dari ancaman terorisme. Tentu saja hal ini berdampak terhadap penerimaan migran muslim yang ada di Amerika Serikat mengalami penurunan yang drastis (“Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States” 2017). Data di bawah ini menjelaskan mengenai penurunan drastis dari penerimaan migran yang berasal dari 7 negara muslim yang ditangguhkan.

**Tabel 2.2.3.1 Penurunan Tingkat Migran dari Negara Muslim yang Ditangguhkan**

Country of Nationality	2016	2017	2018
Iran	3.750	2.577	41
Iraq	9.880	6.886	140
Somalia	9.020	6.130	257
Sudan	1.458	980	76
Syria	12.587	6.557	62
Yemen	26	21	0

Sumber : Yearbook of Immigration Statistics 2018

### **2.3 Kebijakan Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States**

Kebijakan Executive Order 13769 pertama kali diresmikan dan ditandatangani oleh presiden Donald Trump pada 27 Januari 2017. Kebijakan ini seringkali diberi label ataupun disebut Muslim Ban, Travel Ban, atau Trump Muslim Travel Ban oleh Donald Trump sendiri dan pendukungnya bahkan bagi orang yang juga mengkritisi kebijakannya tersebut. Sepanjang kampanye yang

dilakukan oleh Trump di tahun 2016 seringkali Trump memang mengangkat isu isu imigran legal, muslim, dan orang asing yang masuk kedalam United States. Pada saat ia terpilih menjadi presiden dan dilantik di tanggal 20 januari 2017. Satu minggu setelah pelantikan tersebut Donald Trump langsung mengeluarkan Kebijakan *Executive Order* 13769 yang kontroversial.

Donald Trump menggunakan landasan undang – undang *Immigration and Nationality Act* (INA) 8 U.S.C. 1101 pasal 301 dari judul 3, kode Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan *Executive Order* ini tak hanya itu di deklarasi keluarnya kebijakan *Executive Order* 13769 ini. Ia juga memiliki tujuan untuk melindungi negara dan warga negara nya dari kegiatan teroris dan penyerangan oleh warga asing. Menurut Donald Trump kebijakan *United States Refugee Admissions Program (USRAP)* memiliki peran penting dalam mendeteksi warga negara asing yang mungkin melakukan, membantu, dan mendukung gerakan terorisme sehingga sudah menjadi kewajiban bagi negara Amerika Serikat untuk meningkatkan proses penyaringan, dan pemeriksaan terkait penerbitan VISA dan USRAP.

Kebijakan *Executive Order* dideklarasikan dan ditandatangani oleh presiden Donald Trump pada tanggal 27 Januari 2017 di White House (“Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States – The White House” 2017).

Adapun isi dari kebijakan 13769 tersebut, yaitu :

1. Menangguhkan masuknya orang asing yang berasal dari 7 negara muslim diantaranya Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan

Yaman selama 90 hari. Berdasarkan pada pasal 217(a)(12) INA, 8 USC 1187(a)(12) kongres membatasi program :

- a. Pelepasan VISA bagi orang dari atau orang asing yang baru baru ini berada di Irak atau Suriah
  - b. Negara yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sebagai negara penyumbang teroris yaitu Iran, Suriah, dan Sudan.
  - c. Negara yang juga menjadi perhatian Menteri dalam Negeri yaitu Libya, Somalia, dan Yaman yang menjadi negara tambahan untuk diperhatikan sebagai tujuan perjalanan karena dianggap menyimpan banyak teroris
2. Menangguhkan *United States Refugee Admissions Program (USRAP)* selama 120 hari, dikarenakan dalam pengiriman para pengungsi tersebut ke wilayah Amerika Serikat banyak kelompok teroris yang berusaha menyusup untuk ikut ke dalam program pengungsian tersebut.

Semua yang dilakukan oleh Donald Trump ini tentunya bukan tanpa alasan mengeluarkan kebijakan ini. Ia memberikan landasan pasal 2 dalam 212(f) INA yang berisi “Setiap kali Presiden mendapati bahwa masuknya orang asing atau kelompok orang asing mana pun ke dalam Amerika Serikat akan merugikan kepentingan Amerika Serikat, ia dapat melalui proklamasi, dan untuk jangka waktu yang dianggap perlu, menangguhkan masuknya orang tersebut. semua orang asing atau golongan orang asing mana pun sebagai imigran atau non-imigran, atau menerapkan pembatasan apapun terhadap masuknya orang asing yang dianggap

pantas” (“Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States – The White House” 2017).

Amerika Serikat memiliki alasan khusus mengapa menanggukkan negara negara Timur Tengah tersebut. Berdasarkan laporan negara tentang terorisme tahun 2015 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada juni 2016 menyatakan bahwa :

1. Iran adalah negara yang sudah ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme sejak tahun 1984 dan terus mendukung kelompok – kelompok terorisme yang ada. Iran juga tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam kampanye kontra terorisme. Iran juga dikaitkan dengan Al-Qaeda sebagai kelompok teroris yang dianggap ikut andil dalam kejadian 9/11.
2. Libya adalah negara yang memiliki zona tempur aktif fungsi keamanan di negara Libya juga dilaksanakan oleh milisi bersenjata dan bukan lembaga pemerintahan. Benar bahwa Libya bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam kontra terorisme namun Libya tidak mampu Menjaga keamanan maritim dan daratan sejauh ribuan mil. *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas kehadiran mereka dalam negara Libya.
3. Somalia, sebagian dari negara Somalia dijadikan sebagai tempat perlindungan oleh teroris. Al-Shabab dan Al-Qaeda adalah kelompok teroris yang sudah berafiliasi sejak lama di negara Somalia. Kelompok ini terus merencanakan dan melancarkan serangan terhadap negara Somalia sendiri maupun negara tetangga. Somalia memiliki kerjasama kontra terorisme Bersama Amerika Serikat, namun tidak memiliki kekuatan untuk

menjaga perbatasan, mempertahankan tekanan militer, dan menyelidiki tersangka teroris

4. Sudan sama dengan Iran, Sudan juga sudah ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme oleh Amerika Serikat sejak tahun 1993 karena dukungannya terhadap kelompok teroris internasional yaitu Hamas dan Hizbullah. Sudan juga menyediakan tempat bagi kelompok Al-Qaeda dan lainnya untuk bertemu dan berlatih. Sudan juga bekerjasama dengan Amerika Serikat mengenai kontra terorisme juga telah memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda, namun unsur teroris terkait dengan Al-Qaeda dan ISIS masih berkembang di negara tersebut.
5. Suriah juga ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai negara sponsor teroris sejak tahun 1979. Suriah terlibat dalam konflik militer melawan ISIS namun Suriah juga mendukung kelompok ekstrimis lain untuk terus mendorong mereka menyerang seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Suriah juga tidak bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam kontra terorisme.
6. Yaman dinyatakan sebagai lokasi konflik antar pemerintah petahana dan oposisi yang dipimpin oleh Houthi. ISIS dan al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) telah memanfaatkan konflik ini dan melakukan ratusan penyerangan di negara Yaman itu sendiri. Penyelundupan senjata dan bahan lainnya di perbatasan Yaman yang lemah dimanfaatkan oleh kelompok teroris ini untuk membiayai AQAP dan kegiatan teroris lainnya. Yaman mendukung Gerakan Amerika Serikat mengenai kontra terorisme namun tidak pernah benar benar bisa bekerja sama sepenuhnya.



7. Irak sendiri merupakan negara dengan kasus khusus dimana negara Irak masih menjadi zona pertempuran aktif. ISIS memiliki peran yang dominan di wilayah Irak utara dan tengah sejak tahun 2014. Pengaruh ISIS juga sudah berkurang di wilayah Irak tersebut berkat pemerintah militer Irak yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam memukul mundur ISIS. Negara Irak memiliki hubungan demokratis yang baik dengan Amerika Serikat namun Amerika Serikat tetap harus waspada terhadap kemungkinan lain kelompok teroris yang mungkin bisa menjadi ancaman terhadap negaranya.

**BAB 3**

**PANDANGAN REALISME NEOKLASIK DALAM KEBIJAKAN**

**EXECUTIVE ORDER 13769**

**3.1. *Systemic Incentives***

*Systemic Incentives* merupakan elemen yang penting dalam realisme neoklasik disini akan membahas mengenai faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi kebijakan *Executive Order* tersebut. Dalam pandangan realisme neoklasik elemen internasional memiliki perspektif bahwa pengaruh dari kekuatan relatif yang berasal dari luar dijadikan pertimbangan untuk pengambilan suatu kebijakan luar negeri maupun mencapai kepentingan nasional suatu negara. Pengaruh kekuatan relatif ini pun terkadang memberikan sifat yang tidak jelas atau rancu karena tidak ada patokan jelas mengenai ancaman maupun peluang dari pihak luar dan karena pengaruh relative ini terus mengalami perkembangan sehingga tidak bisa dipastikan secara jelas (Taliaferro, Lobell, and Ripsman 2009).

Tergantung dari bagaimana aktor negara melihatnya. Pengaruh relatif ini juga dianggap realisme neoklasik memiliki dampak yang kuat untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Ketika negara ingin mencapai kepentingan nasionalnya tentu saja dibutuhkan lebih dari satu pengaruh relatif, karena dalam perkembangannya tentu negara tidak hanya ingin mencapai satu kepentingan nasional saja. Dalam dunia internasional yang anarkis negara membutuhkan lebih dari satu pengaruh relative untuk saling memberikan keuntungan ataupun saling memberikan peringatan dan ancaman yang lagi lagi Kembali terhadap kepentingan nasional (Taliaferro, Lobell, and Ripsman 2009).

### 3.1.1 Timur Tengah Sebagai Ancaman Sosial

Dalam hal ini Amerika Serikat khususnya di masa kepemimpinan Donald Trump menganggap bahwa Timur Tengah sebagai ancaman bagi kestabilan dan keamanan negara nya sendiri khususnya terhadap negara negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Dari penanggulangan yang dilakukan oleh Donald Trump data memang menunjukkan bahwa mayoritas negara yang mengikuti *United States Refugee Admissions Program (USRAP)* adalah negara negara yang berasal dari Timur Tengah. Sebelum terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat di tahun 2017(Thornton 2017).

**Tabel 3.1.1 Peningkatan Migran Muslim Dalam Program USRAP**

<b>Negara</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Syria</b>	36	105	1.628
<b>Somalia</b>	7.068	9.000	8.858
<b>Iraq</b>	19.487	19.679	12.676
<b>Iran</b>	2.579	2.846	3.109
<b>Sudan</b>	2.160	1.315	1.578

Sumber : Diolah dari data Refugee Arrivals By Region And Country Of Nationality: Fiscal Years 2013 To 2015 by Homeland Security

Data diatas meunjukkan mengenai peningkatan penerimaan pengungsi migran Muslim yang masuk ke Amerika Serikat dan tentunya mempengaruhi sosial yang ada di Amerika Serikat. Ini menjadi pemicu geramnya Donald Trump terhadap pemerintahan Barack Obama dan menilai bahwa pemerintahannya telah gagal dalam mendahulukan kepentingan masyarakat Amerika dan menjaga kestabilan dalam negeri dalam pernyataannya sebagai berikut “*When I became*

*President, ISIS was out of control in Syria & running rampant. Since then tremendous progress made... Caliphate will soon be destroyed, unthinkable two years ago”* (Kruglanski et al. 2019).

### **3.1.2 Timur Tengah Sebagai Ancaman Ekonomi**

Pengaruh relatif Timur Tengah juga dianggap ancaman karena tak hanya satu negara saja yang memberikan pengaruh tersebut namun lebih dari satu negara. Hal ini dianggap Donald Trump dapat merugikan bagi *Native-born America*. Selain menghilangkan lapangan pekerjaan namun juga bisa menjadi pemicu lahirnya terorisme di negara Amerika Serikat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaruh kekuatan relatif bisa jadi ancaman ataupun peluang. Dalam laporan ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh pemerintah AS bulan juni 2015. Disebutkan bahwa perekrutan tenaga kerja AS menurun di 3 bulan terakhir dikarenakan dampak dari pasar global ekonomi yang sedang mengalami penurunan, dan penguatan dollar Amerika sehingga mengurangi penjualan manufaktur AS pada saat itu(The Epoch Times 2015).

Hal ini menyebabkan penurunan lapangan pekerjaan menjadi hanya 136.000 di bulan agustus dan 142.000 pada september. Tentu saja hal ini mempengaruhi Donald Trump untuk lebih waspada terhadap masuknya migran karena AS sendiri sedang mengalami penurunan ekonomi pada saat itu. Menurut laporan dari ketenagakerjaan AS tahun lalu 2014 perekrutan pekerja mencapai angka 260.000 per bulan dalam 1 tahun nya, namun sepertinya angka tersebut tidak dapat dipertahankan karena pertumbuhan ekonomi AS pada saat itu hanya mencapai rata – rata 2% dalam 12 bulan terakhir(The Epoch Times 2015).

### 3.1.3 Timur Tengah Sebagai Ancaman Keamanan

Seperti yang sudah di paparkan pada bab 2 mengenai Problematika migran Muslim yang ada di Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan peristiwa 9/11 yang terjadi. Tentu saja masyarakat Amerika Serikat merasa terancam keamanannya dengan migran Muslim. Dikhawatirkan oknum muslim radikal tersebut bisa sewaktu waktu melakukan hal – hal yang mengancam nyawa para Native-born America. Terdapat kasus bom bunuh diri pada tahun 2014. Bom bunuh diri ini dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat yang terdokterin oleh radikal Muslim untuk melakukan bom bunuh diri tersebut di wilayah markas militer Suriah. Hal ini tentunya bisa memicu yang lainnya untuk mengikuti jejak dari Al – Amriki si bom bunuh diri ini, sehingga perlu adanya pengamanan yang ditingkatkan untuk menghindarkan hal – hal seperti ini. Penanaman nilai nilai nasionalisme Amerika Serikat terhadap Warga Negara dan salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan *Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*(Rizky and Bin Supriyadi 2021).

**Tabel 3.1.1.1 Analisis Faktor Eksternal dalam Systemic Incentives**

No.	Argumen	Analisis
1.	Negara Amerika Serikat mendapatkan pengaruh relatif dari sistem Internasional	<ul style="list-style-type: none"><li>Amerika Serikat mendapatkan pengaruh relatif dari eksternal lebih dari satu negara, negara muslim yang mayoritas berasal dari Timur Tengah yaitu Iran, Irak, Suriah, Sudan, Somalia, Libya, dan Yaman sepanjang tahun 2015-2017</li></ul>

2.	<p>Pengaruh relatif sistem internasional yang tidak jelas apakah ancaman atau peluang bagi negara Amerika Serikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peluang ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan yang berasal dari migran muslim Timur Tengah dipandang sebelah mata oleh Donald Trump</li> <li>● Mayoritas negara muslim yang berasal dari Timur Tengah khususnya Iran, Irak, Suriah, Sudan, Somalia, Libya, dan Yaman dianggap sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat karena alasan alasan keamanan negara yang berkaitan dengan Terorisme.</li> <li>● Pengaruh yang tidak jelas ini dikarenakan banyaknya kejadian terorisme yang mengancam warga Amerika Serikat itu sendiri, walaupun disisi lain ada banyak juga imigran muslim yang berkelakuan baik dan berkontribusi dalam kemajuan Amerika Serikat</li> </ul>
3.	<p>Terdapat lebih dari satu kekuatan relatif dalam sistem internasional yang saling memberikan pengaruh pada negara lain khususnya Amerika Serikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dalam sistem internasional yang anarkis tentu saja Amerika Serikat mendapatkan pengaruh kekuatan relatif bukan hanya dari satu negara saja namun lebih. Dalam studi kasus ini Amerika Serikat mendapatkan pengaruh oleh negara di Timur Tengah yang lebih dari satu seperti Iran, Irak, Suriah, Sudan, Somalia, Libya, dan Yaman.</li> </ul>

4.	Pengaruh sistem internasional dapat memicu perilaku eksternal negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengaruh kekuatan Relatif dari negara negara ini membuat Amerika Serikat bereaksi untuk melindungi negaranya dari ancaman teroris yang terjadi sehingga Donald Trump mengeluarkan Kebijakan <i>Executive Order 13769 yang berjudul Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States.</i></li> </ul>
----	---	---

Sumber: Diolah oleh penulis dari beberapa referensi yang dikaji dalam tulisan ini.

### 3.2. Internal Factors

*Internal Factors* merupakan elemen penting dalam teori realisme neoklasik hal ini masuk ke dalam faktor internal. Penting bagi negara mempertimbangkan faktor internal untuk membuat suatu kebijakan luar negeri. Maka dari itu dalam hal ini ada beberapa alat analisis yang bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa kebijakan *Executive Order 13769* dapat disahkan adalah *leader image, strategic culture, relation between government and public, and regime politique domestic AS.* *Leader Image* Donald Trump sendiri bisa dinilai dari awal kampanye sebelum ia terpilih sampai dengan ia menjadi presiden Amerika Serikat. Donald Trump yang memiliki nama asli Donald John Trump ini lahir di New York city, Amerika Serikat pada tanggal 14 juli 1946 dengan darah keturunan Jerman dan Skotlandia. Trump memulai karir politiknya pada tahun 1987 setelah lulus dari University of Pennsylvania pada tahun 1968. Adapun beberapa variabel yang menjadi alat analisis dalam *internal factors* adalah sebagai berikut :

### ***3.2.1 Leader Image***

Mengawali karir setelah lulus dari kuliahnya dengan menjadi pengusaha dan pebisnis yang akhirnya masuk ke dunia politik dan mulai aktif kembali dalam dunia politik di tahun 2000-an. Trump cukup terkenal dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial antara lain yang ia lakukan di tahun 2011 menentang kebijakan politik Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Barack Obama. Pada tahun 2015 ia mengumumkan bahwa ia akan menjabat sebagai presiden Amerika Serikat selanjutnya, sehingga pada saat itu ia sudah mulai melakukan kampanye sepanjang tahun 2015. Pada saat kampanye tersebut ia banyak menuai kontroversial seperti isu rasis, skandal pajak, imigran legal, islamophobia, kasus di masa lalu, sampai dengan black campaign yang ia lakukan terhadap lawan politiknya pada saat itu Hillary Clinton (CNN 2013).

Sepanjang kampanye tahun 2016 Donald Trump terus mengangkat isu imigran khususnya muslim padahal di tahun sebelumnya pada masa kepemimpinan Barack Obama isu mengenai migran muslim ini sudah mulai reda di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Donald Trump mengangkat isu imigran muslim dikarenakan ada beberapa oknum imigran muslim radikal yang melakukan penembakan kriminalitas salah satunya yaitu penembakan massal yang terjadi di San Bernardino dan Orlando yang menewaskan 14 orang dan 21 lain terluka. Donald Trump memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter segala kebijakannya hanya atas keinginannya sendiri. Banyak Kebijakan Donald Trump yang tidak sesuai dengan nilai – nilai bangsa Amerika Serikat



sebelumnya yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keterbukaan, namun dalam kepemimpinan Donald Trump segalanya serba berseberangan (Aulia, Susiatiningsih, and Paramasatya 2022).

Selama kampanye sebelum terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ia terus menggunakan slogan "*Make America Great Again*" di setiap pidatonya menekankan keamanan bagi masyarakat Amerika Serikat. Dalam salah satu pidatonya juga ia sering menyebutkan mengenai imigran muslim salah satunya adalah pidatonya yang berbunyi "*Until our country's representatives can figure out what is going on Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country cannot be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life*" (CNN Politics 2015). Dari pidato Donald Trump di atas menyatakan ketidaksukaannya terhadap Imigran Muslim karena ia memukul rata seluruh imigran muslim berperilaku tidak hormat kepada sesama manusia.

Tak hanya pidatonya selama kampanye saja namun banyak cuitannya di aplikasi X yang menuai kontroversial mengenai migran muslim itu sendiri "*If elected POTUS—I will stop RADICAL ISLAMIC TERRORISM in this country! In order to do this, we need to #DrainTheSwamp!*" (Oct, 2016). Dari kata kata dan hastag yang digunakan oleh Donald Trump ini seakan akan mengeneralisir bahwa seluruh muslim radikal. Kata kata *swamp* juga dinilai kata yang sangat tidak baik yang dikeluarkan dalam cuitannya seakan akan kaum muslim dipandang serendah itu oleh Donald Trump. Di cuitan tweet nya yang lain juga bersihkan "*If I'm elected President, I am going to keep Radical Islamic*

*Terrorists out of our country!*” (Oct 2016). Dari cuitan cuitannya di twitter ini bisa disimpulkan bahwa image Donald Trump pada saat kampanye ini adalah American vs Muslim dimana ia menggiring opini public untuk turut ikut dalam segala kampanye yang ia lakukan mengenai migran muslim itu sendiri (Khan et al. 2021).

### **3.2.2 *Strategic Culture / Budaya Strategis***

Amerika Serikat sendiri bisa dilihat dari sejarah Amerika Serikat yang memiliki suku asli Amerika yang didominasi oleh suku Indian dimana suku ini mempercayai keyakinan mengenai mimpi mimpi dan cerita cerita baik yang berkembang di masyarakatnya. Sehingga dalam bukunya Samuel Huntington juga menyebutkan bahkan mencetuskan bahwa Amerika Serikat telah mengidentifikasikan atau menjelaskan bahwa dirinya adalah sebagai pihak yang baik dan musuh nya atau lawannya merupakan pihak yang jahat atau buruk dalam setiap konflik luar negeri negara Amerika Serikat. Maka dari itu sudah sangat terpatrit di jiwa bangsa nya bahwa budaya “*good vs evil*” ini menjadi acuan terhadap setiap tingkah laku dan keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan nasionalnya (Huntington 1993).

Budaya *good vs evil* sendiri ini juga sudah terdapat secara tidak langsung dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 salah satu bait dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa “*That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government*” dari bait ini bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintahan yang “*evil*” dapat digantikan dengan pemerintahan baru yang

lebih baik dan bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat Amerika Serikat di masa depan, hal ini menyiratkan arti secara tidak langsung bahwa pemerintahan yang jahat versus pemerintahan baik yang menggantikannya sama dengan “*evil vs good*” (“Declaration of Independence: A Transcription” 2015)

Dalam sepanjang sejarah perang Amerika Serikat juga mereka mengatakan bahwa peperangan yang dilakukan untuk memberantas evil atau kejahatan perang perang yang disebutkan ini adalah perang dunia satu maupun dua. Hal ini menjadikan personifikasi AS menjadi negara yang berada di pihak yang baik atau good tentunya hal ini memperkuat posisi AS karena bertindak berdasarkan moral sehingga apapun yang mendukung moral maka akan dipersonifikasikan sebagai tindakan kebaikan memperkuat posisi AS dalam dunia internasional. Musuh dari Amerika Serikat sendiri sering dikatakan sebagai devil atau jahat karena mereka selalu menganggap mereka baik dan musuh nya jahat dan devil juga sering diasosiasikan dengan kepemimpinan diktator ataupun ideologi totalitarian (Beneš 2018).

Karena budaya strategis yang sudah mengakar di Amerika Serikat mengenai *good vs evil* ini maka hal ini juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat karena budaya yang menganggap ada perbedaan fundamental antara yang benar dan yang salah. Pihak yang benar haruslah didukung sebanyak banyaknya sedangkan pihak yang salah harus di tekan sejadi jadinya (Mahnken 2009). Selama masa kampanyenya menjadi presiden Amerika Serikat ke-45 ia selalu mengagungkan mengenai *American First, Make America Great Again* slogan

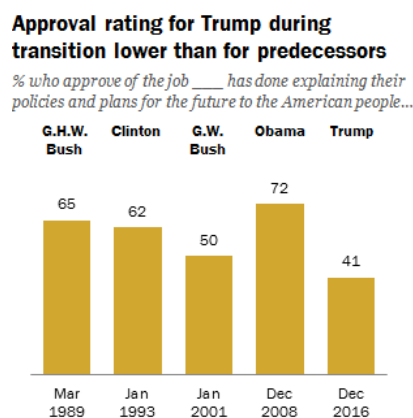
ini disebut terus menerus di setiap pidato nya dan selama itu juga dia selalu mengangkat isu mengenai migran muslim.

Donald Trump menganggap migran muslim sebagai ancaman beberapa pernyataan pernyataannya terhadap imigran muslim yang menyiratkan evil vs good seperti “*More radical Islam attacks today—it never ends! Strengthen the borders; we must be vigilant and smart. No more being politically correct*” (Jan, 2016). Dari twitter nya ini seolah olah ia ingin mengatakan bahwa muslim radikal sangat jahat dan ia tidak akan membiarkan hal itu terus terjadi dengan teknik hiperbola yang digunakannya dalam cuitan itu dan membuat public merasakan emosi yang sama dengan mengatakan untuk memperkuat dari kejahatan yang ada yaitu migran muslim atau oknum radikal muslim.

### 3.2.3 *Relation Between Government and Public*

Sepanjang masa kampanye Donald Trump tentu banyak sekali menuai pro kontra yang terjadi atas pernyataan yang disampaikannya. Selama masa kampanye juga tentunya masyarakat Amerika akan menilai pemimpin seperti apakah seorang Donald Trump ini sehingga bisa menilai pantas atau tidakkah ia untuk memimpin Amerika selanjutnya,

**Grafik 3.1** Penerimaan masyarakat Amerika Serikat terhadap pencalonan Donald Trump sebagai calon presiden

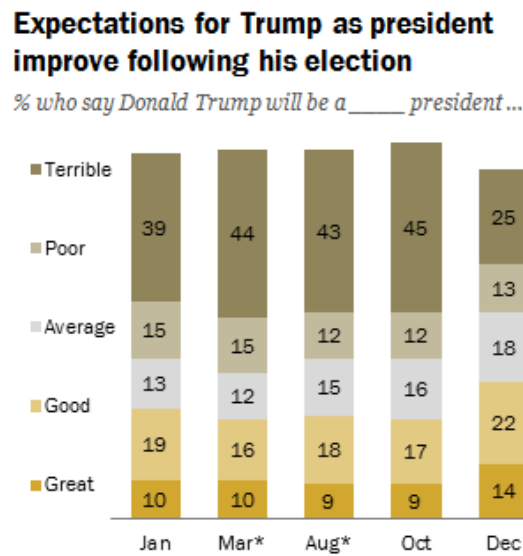


Sumber : Pew Research Center Tahun 2016

Menurut dari grafik yang diambil oleh Pew Research Center persentase penerimaan masyarakat terhadap pencalonan Trump sebagai Calon presiden Amerika ke-45 ini cenderung kurang dan tidak antusias dalam menyambutnya. Dari data di atas ini menjelaskan pandangan masyarakat dan penerimaan masyarakat terhadap Donald Trump semasa kampanye tahun 2016 hanya sekitar 41% masyarakat saja yang menyetujui pekerjaannya mengenai narasi masa depan mau dibawa kemana negara Amerika Serikat ketika ia menjabat menjadi Presiden ke-45, namun lebih banyak yang tidak mempercayai kinerjanya di masa mendatang yaitu sebanyak 55% menyatakan tidak menyetujui kebijakan dan rencana masa depan yang ia gembor-gemborkan tersebut. Dibandingkan dengan presiden di tahun-tahun sebelumnya Trump memiliki penerimaan masyarakat paling rendah. Pada masa Barack Obama sebelumnya masyarakat memiliki kepercayaan paling tinggi akan kebijakan dan penjelasan rencana masa depan Amerika Serikat oleh presiden ke-44 yaitu Barack Obama (NW, Washington, and Media 2016).

Begitupun selama Barack Obama masyarakat memiliki hubungan yang sangat baik terhadap kepemimpinan dan pemerintahan masa kepemimpinan Barack Obama karena kebijakannya yang tidak diskriminasi dan kontroversial. Kebijakan Barack Obama cenderung merangkul seluruh masyarakat Amerika Serikat. Adapun data lain mengenai ekspektasi masyarakat mengenai akan menjadi presiden seperti apakah Trump di masa mendatang sebagai berikut :

**Grafik 3.2 Ekspektasi masyarakat Amerika Serikat terhadap Trump akan menjadi presiden seperti apa ketika terpilih**

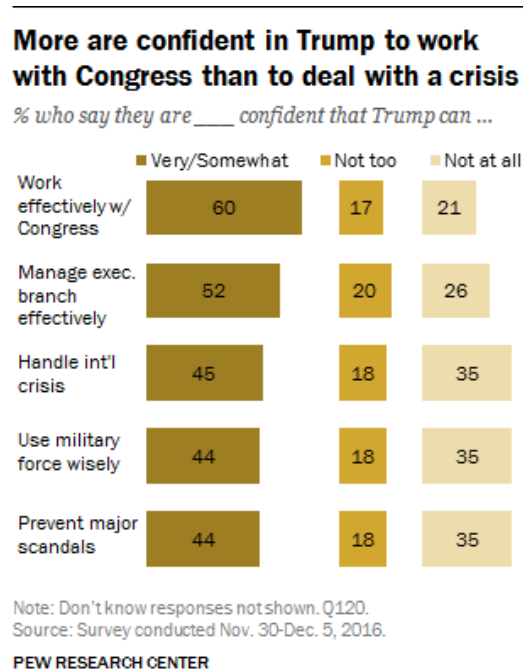


Sumber : Pew Research Center tahun 2016

Dari data yang diambil di tahun 2016 mayoritas masyarakat berekspektasi bahwa Donald Trump akan menjadi presiden yang miskin dan buruk walaupun secara keseluruhan 35% masyarakat menganggap Trump akan menjadi presiden yang hebat dan baik sementara sebanyak 38% lainnya berpendapat Trump akan menjadi presiden yang miskin dan buruk dan 25% lainnya mengatakan Trump akan menjadi presiden yang biasa-biasa saja. Tentu saja selama masa kampanye nya ia mempunyai masyarakat yang pro dan kontra terhadap gagasan gagasan nya untuk masa depan Amerika Serikat. Salah satu kelompok yang mendukung kampanye Donald Trump tentu saja adalah partai pengusungnya yaitu partai Republik dimana pada saat ini partai Republik memiliki pendukung yang banyak dan mayoritas umum Amerika Serikat dimenangkan oleh Partai Republik, tak hanya kelompok partainya saja, rata rata yang setuju dengan kampanye.

Donald Trump adalah orang-orang yang memiliki sentiment dengan migran khususnya muslim. Dalam beberapa data yang ada mengenai rendahnya tingkat penerimaan dan ekspektasi yang buruk terhadap Trump ia juga mendapati hasil data yang cukup baik dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap Trump untuk menangani aspek kepresidenan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

**Grafik 3.3 Kepercayaan masyarakat Amerika Serikat terhadap Trump dalam menangani kasus kepresidenan yaitu untuk bekerja sama dengan kongres dan menangani krisis.**



Sumber : Pew Research Center tahun 2016

Data ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Amerika terhadap Trump untuk menangani aspek-aspek kepresidenan. Dalam indikator bekerja sama dengan kongres 26% masyarakat mengatakan mereka sangat yakin, 35% yakin saja. Di indikator selanjutnya mengenai pengelolaan cabang eksekutif secara efektif 52% sangat dan agak yakin

bahwa Trump mampu melakukan ini dengan baik. Dalam menangani krisis internasional 45% sangat atau agak yakin Trump mampu melakukan hal ini. Didua indikator terakhir yaitu mengenai penggunaan kekuatan militer secara bijak dan mencegah skandal besar dalam pemerintahannya sebanyak 44% masyarakat sangat atau agak yakin bahwa Trump bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan dapat diandalkan (NW, Washington, and Media 2016).

Setelah terpilih menjadi presiden AS ke-45 ia langsung mengeluarkan kebijakan kebijakan yang sangat kontroversial karena dianggap kebijakan tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan nilai nilai AS yang dibangun bersama sama oleh imigran. Tak hanya itu Kebijakan Executive Order yang dikeluarkan Trump ada tiga salah satu diantaranya adalah *Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*. Mayoritas masyarakat Amerika Serikat tidak setuju dengan kebijakan Donald Trump ini bahkan bukan hanya masyarakat sipil saja partai demokrat juga hampir bersatu untuk mengecam Kebijakan 13769 tersebut.

Senator Bernie Sanders dan Kamala Harris mantan menteri luar negeri AS Madeleine Albright and Hillary Clinton serta mantan presiden AS 44 yaitu Barack Obama juga tidak menyetujui langkah yang diambil Donald Trump di awal kepemimpinannya ini. Banyak protes dan demo besar besaran yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu dimulai dari bandara JFK New York dan dengan cepat menyebar ke kota-kota lain di Amerika Serikat. Sejak Kebijakan Executive Order 13769 ini



ditandatangani Donald Trump ratusan bahkan ribuan pengunjung rasa berkumpul di bandara untuk unjuk rasa dan berbagai macam lokasi di seluruh Amerika Serikat (Michael George 2017).

**Gambar 3.1 Demonstran di Bandara Internasional John F.**

**Kennedy terminal 4 di New York**



Sumber : NBC New York 2017

Protes juga berlangsung di bandara internasional Hartsfield – Jackson, Los Angeles, O’Hare Chicago, Detroit, Washington D.C, Texas, dan masih banyak negara bagian lainnya. Di San Fransisco para demonstran juga sampai membawa bendera nasional negara Yaman untuk mendukung komunitas muslim Yaman dan negara muslim lain yang di ban oleh kebijakan Executive Order 13769 Donald Trump. Protes tak hanya berlaku di dunia nyata saja, namun protes juga berlaku di dunia maya dimana lewat #muslimban banyak masyarakat AS yang juga ikut turut mengecam Kebijakan Donald Trump (Aaron Cynic 2017).

**Gambar 3.2 dan 3.3 *Protesters gather at U.S. Customs and Border Protection offices in Washington in 2017 to oppose a new travel ban created by President Donald Trump.***

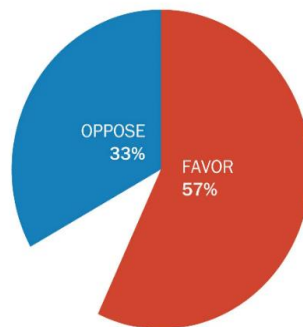


Sumber : The Washington Post 2017

Dengan respon yang beragam oleh masyarakat AS didapatkan beberapa penelitian jajak pendapat yang dilakukan oleh Rasmussen Report sebelum kebijakan *Executive Order 13769* ini dikeluarkan dengan bertanya mengenai “apakah mereka mendukung atau menentang mengenai larangan sementara 7 negara muslim masuk ke AS sampai pemerintah federal menemukan cara yang tepat untuk menyaring pengungsi calon teroris masuk ke dalam AS?” dan memperoleh hasil sebagai berikut :

**Diagram 3.1 Hasil jajak pendapat masyarakat Amerika Serikat mengenai Kebijakan Executive Order 13769 sebelum dikeluarkan oleh Donald Trump.**

RASMUSSEN  
 Do you favor or oppose a temporary ban on refugees from Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen until the federal government improves its ability to screen out potential terrorists from coming here?  
 Jan. 2017 polling.



Sumber : The Washington Post 2017

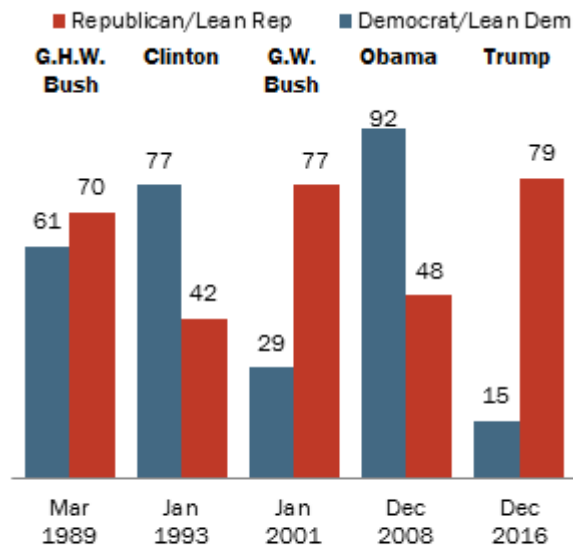
Dari hasil jajak pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Amerika Serikat juga menyetujui mengenai keluarnya Kebijakan Executive Order ini maka dari itu Donald Trump merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi ini maka dikeluarkanlah Kebijakan Executive Order tersebut (Bump 2021).

### ***3.2.4 Regime Politique Domestic AS.***

Partai republik atau yang juga biasa disebut oleh Grand Old Party (GOP) ini merupakan salah satu dari dua partai besar di Amerika Serikat. Partai republic ini didirikan pada tahun 1854 sebagai kelompok yang dikenal menentang penyebaran perbudakaan ke wilayah Barat. Pada tahun 1850 an partai ini aktif dalam menyuarkan hak hak orang Afrika – Amerika pasca perang saudara yang terjadi. Partai Republik saat ini cenderung konservatif sehingga melihat hal hal lebih dari pada pandangan moral, mendukung pajak yang lebih kecil, intervensi federal yang lebih sedikit dalam perekonomian (“Republican Party” 2021). Partai republik ini juga lebih menyukai peraturan yang sederhana dan lebih sedikit terhadap perekonomian dan cenderung tidak ingin banyak membiayai program sosial yang ada di masyarakat, walaupun pada umumnya mereka juga mendukung kebijakan sosial yang konservatif.

Dalam mengeluarkan Kebijakan luar negerinya partai republik secara tradisional memiliki upaya agresif yang kuat untuk mengamankan negara Amerika Serikat dan mendukung pertahanan nasional yang sangat kuat. Dalam hal ekonomi mereka juga menginisiasi pajak yang rendah untuk bisa menstimulus ekonomi negara dan untuk memajukan kebebasan ekonomi individu. Dalam banyak kasus dan sejarah yang ada selama Partai Republik ini berdiri mereka sering menyuarkan dan mendukung hak-hak negara bagian terhadap pemerintah federal (Smith 2021). Karena partai Republik adalah partai yang mengusung majunya Donald Trump dalam pemilu 2016 maka kurang lebih pemikiran dan kebijakan kebijakan yg dikeluarkan oleh Donald Trump dipengaruhi oleh rezim nya saat itu

**Grafik 3.4 Kepercayaan partai di Amerika Serikat Terhadap kebijakan Donald Trump di masa depan**



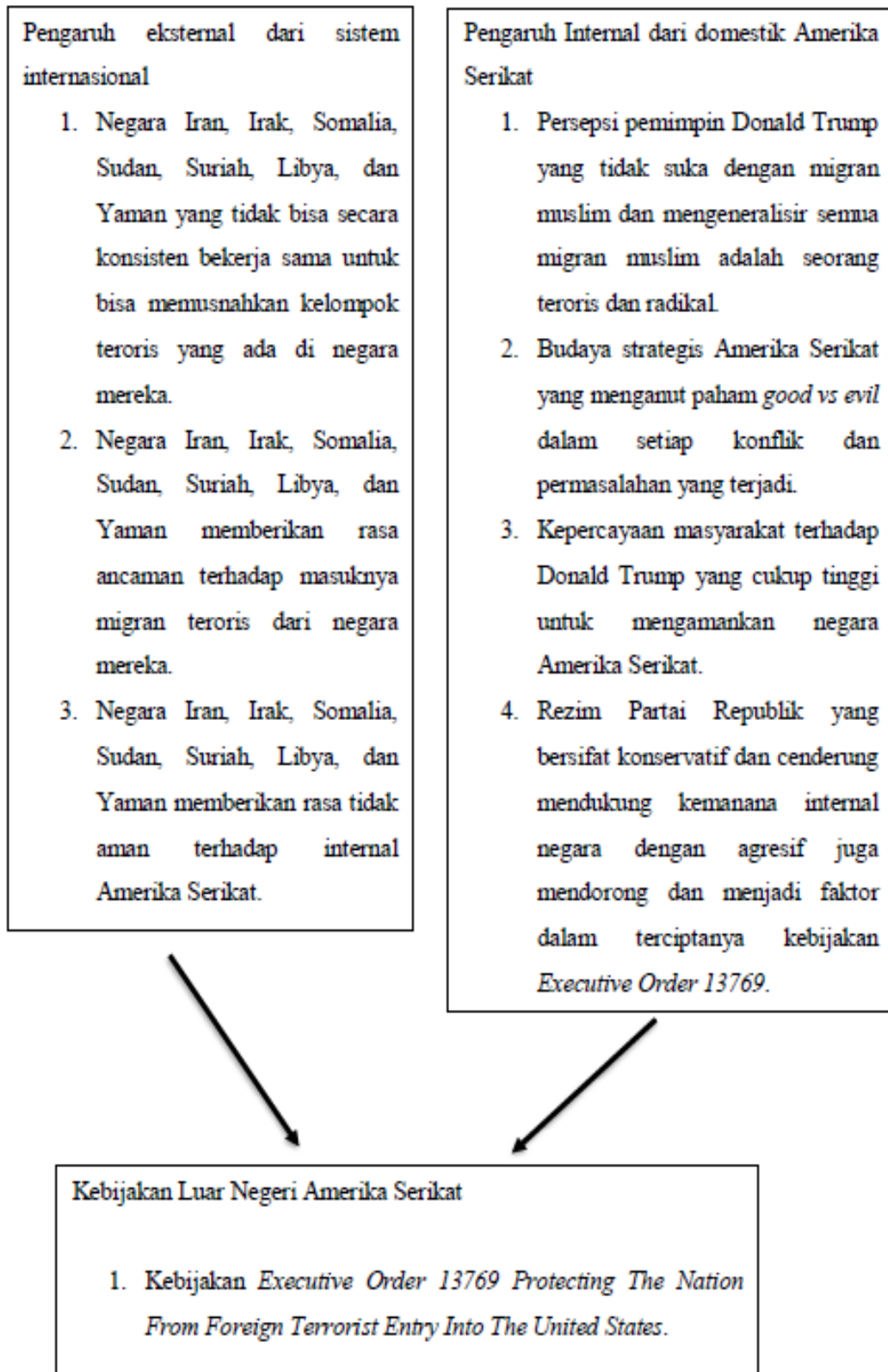
Note: Data for March 1989 from Gallup. Q68.  
Source: Survey conducted Nov. 30-Dec. 5, 2016.

PEW RESEARCH CENTER

Sumber : Pew Research Center 2016

Data di atas ini menunjukkan bahwa sekitar 79% anggota Partai Republik dan pendukung partai ini menyetujui usaha yang dilakukan oleh Donald Trump untuk menyampaikan Kebijakan – kebijakannya di masa yang akan mendatang atau di masa depan. Hanya sekitar 15% saja yang tidak menyetujui nya dan tentunya berasal dari Partai Demokrat. Bisa disimpulkan bahwa dorongan untuk mengeluarkan kebijakan *Executive Order* sangat dipengaruhi rezim Donald Trump. Belum lagi dengan konsep konservatif yang semakin mendukung budaya strategis Amerika “*evil vs good*” (NW, Washington, and Media 2016).

### 3.3 Bagan Penjelasan Terbentuknya Foreign Policy



## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari bagaimana *kebijakan Executive Order 13769 Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States* bisa disahkan ditinjau melalui kacamata realisme neoklasik mulai dari tahun 2015 – 2017. Banyaknya pengaruh kekuatan relatif tidak jelas yang diberikan negara negara di Timur Tengah seperti Somalia, Suriah, Libya, Yaman, Sudan, Iran, dan Irak ini memicu perilaku eksternal yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat. Banyak bentuk kerjasama yang dilakukan mulai dari hubungan bilateral kepada negara negara ini untuk mengamankan kawasan negara mereka dan menekan aktivitas kelompok teroris yang ada di negara tersebut, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Benar bahwa banyak juga migran Muslim yang memiliki kontribusi yang bisa di pertimbangkan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan tidak sedikit pengaruh muslim pada kemajuan Amerika Serikat, namun hal ini tidak sebanding dengan perasaan trauma yang dimiliki warga Amerika Serikat terhadap penyerangan 9/11 dan penembakan massal oleh oknum radikal Muslim tersebut. Ditinjau melalui perspektif realisme neoklasik faktor eksternal yang tidak jelas ini membuat Amerika Serikat merasa terancam dengan kehadiran imigran muslim dari beberapa negara tersebut. Jika ditinjau dari faktor internalnya sendiri mulai dari leader image Donald Trump yang konservatif dan cenderung islamophobia, strategic culture Amerika Serikat yang sedari dulu mempercayai bahwa mereka adalah bangsa yang baik sehingga siapapun yang menjadi lawan dari mereka adalah

jahat, budaya strategis *good vs evil* yang berkembang di masyarakat Amerika Serikat,

*Relation between public and government* juga menunjukkan data yang signifikan bahwa mayoritas masyarakat percaya dengan kebijakan ini bisa membuat Amerika Serikat lebih aman, dan yang terakhir adalah *Regime political domestic* yang memiliki sifat konservatif selaras dengan Donald Trump cenderung mementingkan keamanan internal Amerika Serikat secara agresif hal – hal ini yang semakin mendorong Donald Trump untuk mengesahkan kebijakan *Executive Order 13769* tersebut. Walau Amerika Serikat pada saat itu juga banyak menuai kecaman dari beberapa tokoh masyarakat dan politik serta juga banyak masyarakat yang berdemo tidak setuju dengan kebijakan tersebut, pada akhirnya kebijakan ini tetap dilaksanakan. Dalam kebijakan ini Donald Trump tentunya ditinjau dari kacamata realisme neoklasik telah mempertimbangkan faktor eksternal dari pengaruh kekuatan relatif dan mengkondisikan faktor internalnya sebelum mengeluarkan kebijakan *Executive Order 13769*.

#### **4.2 Rekomendasi**

Skripsi ini telah menganalisis dan menjelaskan mengenai bagaimana bisa kebijakan *Executive Order 13769* disahkan sebagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari tahun 2015 sampai 2017 dianalisis menggunakan teori realisme neoklasik. Ditemukan analisis bahwa kebijakan *executive order 13769* ini bisa disahkan karena Donald Trump mempertimbangkan pengaruh kekuatan relative faktor eksternal dan mengkondisikan faktor internalnya seperti *leader image, strategic culture, regime politique domestic, dan relation between public and government* dalam mengesahkan kebijakan *Executive Order 13769* tersebut.

Penelitian ini hanya meneliti mengenai bagaimana kebijakan Executive Order 13769 mengenai *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States* ini disahkan, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan ini disahkan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan ada penelitian – penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai kebijakan Executive Order lain yang dikeluarkan dan disahkan oleh Donald Trump selama masa kepemimpinannya selain mengenai Imigran muslim Timur Tengah ini, seperti kebijakan Executive Order 13767 mengenai *Border Security and Immigration Enforcement Improvements*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mahnken, Thomas G. 2009. "U. S. Strategic and Organizational Subcultures." In *Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction: Culturally Based Insights into Comparative National Security Policymaking*, edited by Jeannie L. Johnson, Kerry M. Kartchner, and Jeffrey A. Larsen, 69–84. Initiatives in Strategic Studies: Issues and Policies. New York: Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/9780230618305\\_5](https://doi.org/10.1057/9780230618305_5).
- Ripsman, Norrin M, Jeffrey W Taliaferro, and Steven E Lobell. 2016. "Neoclassical Realist Theory of International Politics." In *Neoclassical Realist Theory of International Politics*, 1–80. Oxford University Press.
- Rose, Gideon, International Security by Michael E. Brown Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino-American Conflict, 1947-1958 by Thomas J. Christensen Deadly Imbalances: Tripolarity, and ... Hitler's Strategy of World Conquest by Randall L. 1998. "Review: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy." *World Politics* 51 (1): 144–72.
- Taliaferro, Jeffrey W., Steven E. Lobell, and Norrin M. Ripsman. 2009. "Introduction: Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy." In *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*, edited by Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, 1st ed., 1–41. Cambridge University Press

### Jurnal

- Aulia, Marsanda, Hermeni Susiatiningsih, and Satwika Paramasatya. 2022. "Analisis Sekuritisasi Presiden Donald Trump Dalam Kebijakan" 8 (International Relations).
- Beneš, Jan. 2018. "U.S. Strategic Culture and the Genesis of Counterinsurgency Doctrine." *AUC STUDIA TERRITORIALIA* 17 (1): 61–79. <https://doi.org/10.14712/23363231.2017.18>.
- Damayanti, Angel, and Calvin Ericke Zrada. 2022. "Trump's Immigration Policy At The US-Mexico Border And The Impact On Human Security." *Journal of Positive School Psychology* 6 (9): 2617–36
- Eisen, Joel B. 2003. "The Trajectory of 'Normal' After 9/11: Trauma, Recovery and Post-Traumatic Societal Adaptation." *University of Richmond*.
- Khan, Mohsin Hassan, Farwa Qazalbash, Hamed Mohd Adnan, Lalu Nurul Yaqin, and Rashid Ali Khuhro. 2021. "Trump and Muslims: A Critical Discourse Analysis of Islamophobic Rhetoric in Donald Trump's Selected Tweets."

SAGE Open 11 (1): 215824402110041.  
<https://doi.org/10.1177/21582440211004172>.

Logan, Rayford W. 1940. "Estevanico, Negro Discoverer of the Southwest: A Critical Reexamination." *Phylon (1940-1956)* 1 (4): 305–14.  
<https://doi.org/10.2307/272298>.

Taufik, Taufik, and Sundari Ayu Pratiwi. 2021. "American First: Kebijakan Donald Trump dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat." *Intermestic: Journal of International Studies* 6 (1): 221.  
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n1.11>.

## Laporan

Center, Pew Research. 2017. "1. Demographic Portrait of Muslim Americans." *Pew Research Center's Religion & Public Life Project* (blog). July 26, 2017.  
<https://www.pewresearch.org/religion/2017/07/26/demographic-portrait-of-muslim-americans/>.

"Declaration of Independence: A Transcription." 2015. National Archives. November 1, 2015. <https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript>.

"Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States – The White House." 2017. March 6, 2017.  
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/>.

NW, 1615 L. St, Suite 800 Washington, and DC 20036 AS202-419-4300 | Utama202-857-8562 | Faks202-419-4372 | Pertanyaan Media. 2016. "1. Views of President-elect Trump and his administration." *Pew Research Center - U.S. Politics & Policy* (blog). December 8, 2016.  
<https://www.pewresearch.org/politics/2016/12/08/1-views-of-president-elect-trump-and-his-administration/>.

"UN Secretary-General António Guterres Announces Founder and CEO of Chobani, Mr. Hamdi Ulukaya as SDG Advocate." 2022. SDG Advocates. July 20, 2022. <https://www.unsdgadvocates.org/news/un-secretary-general-antonio-guterres-announces-founder-and-ceo-of-chobani-mr-hamdi-ulukaya-as-sdg-advocate>

## Artikel

Armandhanu, Denny. 2015. "Pelaku Penembakan San Bernardino Diduga Berbaiat pada ISIS." *internasional*. December 5, 2015.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151205003752-134-96146/pelaku-penembakan-san-bernardino-diduga-berbaiat-pada-isis>.

- Arroncynic. 2017. "Chicagoans Are Protesting Trump's Immigration Ban At O'Hare: Chicagoist." 2017. [https://web.archive.org/web/20170129002043/http://chicagoist.com/2017/01/28/chicagoans\\_protest\\_trumps\\_immigrati.php](https://web.archive.org/web/20170129002043/http://chicagoist.com/2017/01/28/chicagoans_protest_trumps_immigrati.php)
- Beckett, Lois. 2016. "Orlando Nightclub Attack Is Deadliest US Mass Shooting in Modern History." *The Guardian*, June 12, 2016, sec. US news. <https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/12/orlando-nightclub-deadliest-mass-shooting-terrorism>.
- Bump, Philip. 2021. "Do Americans Support Trump's Immigration Action? Depends on Who's Asking, and How." *Washington Post*, October 23, 2021. <https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/02/02/do-americans-support-trumps-immigration-action-depends-on-whos-asking-and-how/>
- CNN. 2013. "Donald Trump Fast Facts | CNN Politics." CNN. July 4, 2013. <https://www.cnn.com/2013/07/04/us/donald-trump-fast-facts/index.html>.
- CNN Politics. 2015. "Donald Trump: Ban All Muslim Travel to U.S. | CNN Politics." December 2015. <https://edition.cnn.com/2015/12/07/politics/donald-trump-muslim-ban-immigration/index.html>.
- Feifer, Jason. 2020. "Why We Put 137 People on Our Cover." *Entrepreneur*. July 7, 2020. <https://www.entrepreneur.com/growing-a-business/why-we-put-137-people-on-our-cover/352181>.
- Kruglanski, Arie, David Webber, Erica Molinario, and Katarzyna Jaśko. 2019. "Are Syrian refugees a danger to the West?" *The Conversation*. July 19, 2019. <http://theconversation.com/are-syrian-refugees-a-danger-to-the-west-113803>.
- Medina, Jennifer, Richard Pérez-Peña, Michael S. Schmidt, and Laurie Goodstein. 2015. "San Bernardino Suspects Left Trail of Clues, but No Clear Motive." *The New York Times*, December 3, 2015, sec. U.S. <https://www.nytimes.com/2015/12/04/us/san-bernardino-shooting.html>.
- Michael George. 2017. "After Daylong Protests, Judge Blocks Deportation of Immigrants Detained at US Airports – NBC New York." 2017. <https://www.nbcnewyork.com/news/local/following-detainment-refugees-welcome-protest-erupts-at-jfk-airport/261395/>.
- Sayej, Nadja. 2019. "'Forgotten by Society' – How Chinese Migrants Built the Transcontinental Railroad." *The Guardian*, July 18, 2019, sec. Art and design. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jul/18/forgotten-by-society-how-chinese-migrants-built-the-transcontinental-railroad>.

- Siobhan Ogrady. 2018. "Ilhan Omar: Muslim Refugee from Somalia Wins Minnesota House Seat - The Washington Post." November 7, 2018. <https://www.washingtonpost.com/world/2018/11/07/trump-demonized-somali-refugees-minnesota-one-them-just-won-seat-congress/>.
- Thornton, Liam. 2017. "Q&A: what legal obligation does the US have to accept refugees?" The Conversation. January 27, 2017. <http://theconversation.com/qanda-what-legal-obligation-does-the-us-have-to-accept-refugees-72007>.
- Boundless. 2017a. "How September 11 Changed the U.S. Immigration System." Boundless. 2017. <https://www.boundless.com/research/how-9-11-changed-the-u-s-immigration-system/>.
- Boundless, wp. 2017b. "Immigration under Barack Obama." Boundless. May 21, 2017. <https://www.boundless.com/blog/obama/>.
- "Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements – The White House." n.d. Accessed November 7, 2023. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/>.
- Goodman, J. David, and Ron Nixon. 2016. "Obama to Dismantle Visitor Registry Before Trump Can Revive It." *The New York Times*, December 22, 2016, sec. New York. <https://www.nytimes.com/2016/12/22/nyregion/obama-to-dismantle-visitor-registry-before-trump-can-revive-it.html>.
- Illinois University Library. 2003. "Welcome | IDEALS." 2003. <https://www.ideals.illinois.edu/>.
- "Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States." 2017. Federal Register. February 1, 2017. <https://www.federalregister.gov/documents/2017/02/01/2017-02281/protecting-the-nation-from-foreign-terrorist-entry-into-the-united-states>.
- Rizky, Lucitania, and Heru Siswoyo Kurniawan Bin Supriyadi. 2021. "Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump." *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 4 (2): 15–28. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944>.
- The Epoch Times. 2015. "US Jobs Data Will Show Whether Pace of Hiring Remains Modest." The Epoch Times. 2015. <https://www.theepochtimes.com/article/us-jobs-data-will-show-whether-pace-of-hiring-remains-modest-1892496>.

Thornton, Liam. 2017. "Q&A: what legal obligation does the US have to accept refugees?" The Conversation. January 27, 2017. <http://theconversation.com/qanda-what-legal-obligation-does-the-us-have-to-accept-refugees-72007>.

Transactional Records Access Clearinghouse,. 2021. "TRAC: About Us." 2021. <https://trac.syr.edu/aboutTRACgeneral.html>.